

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maka disusun sasaran dan prioritas pembangunan yang menjadi fokus atau agenda pembangunan bersifat strategis yang dilaksanakan pada tahun berkenaan sebagai satu kesatuan tahapan kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah. Kemudian, untuk mencapai sasaran pembangunan daerah ditetapkanlah skala prioritas pembangunan daerah sebagai cerminan dari urgensi permasalahan yang akan diselesaikan pada tahun berkenaan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena prioritas yang dirumuskan dalam setiap tahapan dapat berbeda-beda, tetapi semua itu harus tetap berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam suatu rangkaian kebijakan jangka menengah.

Prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 mengacu pada arah kebijakan dalam RPJMD yang selanjutnya menjadi pedoman yang harus diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan/subkegiatan pembangunan daerah. Program dan kegiatan/subkegiatan dimaksud harus dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai satu kesatuan program strategis daerah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD.

Prioritas pembangunan daerah dalam RKPD harus memenuhi berbagai kriteria pokok maupun *optional* sesuai perkembangan pembangunan terkini. Adapun, kriteria yang digunakan dalam penyusunan prioritas untuk RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Merupakan penerjemahan dan pelaksanaan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dalam mencapai visi dan misi Kepala daerah melalui tahapan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku;
2. Mempedomani dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis Provinsi (RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dan Prioritas Nasional sebagaimana diamanatkan dalam RKP tahun 2023;
3. Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah mendesak pada tahun 2023 di Kabupaten Tegal; serta
4. Pengembangan sektor atau bidang potensial yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah.

4.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul,
Berbudaya dan Berakhlak Mulia”**

Arti Visi:

- Sejahtera : Masyarakat Kabupaten Tegal yang sehat dan bahagia, mampu mengembangkan hidupnya secara layak dan bermartabat serta memiliki akses pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara berkeadilan dan ramah lingkungan.
- Mandiri : Masyarakat Kabupaten Tegal yang produktif, punya etos kerja tinggi, mampu mengembangkan dan memantapkan usaha ekonomi lokalnya secara mandiri dan .
- Unggul : Masyarakat Kabupaten Tegal yang memiliki pemikiran maju, optimis, semangat belajar yang tinggi, ditunjang kemampuannya dalam berinovasi dan berkreasi untuk menghasilkan karya nyata yang bermanfaat dan berdaya saing tinggi.
- Berbudaya : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki semangat gotong royong yang tinggi, berperilaku hidup bersih dan sehat serta memegang teguh nilai-nilai tradisi, kearifan dan budaya lokal.
- Berakhlak Mulia : Masyarakat Kabupaten Tegal memiliki sikap dan karakter kepribadian yang arif dan bijaksana yang tercermin dalam perilaku warganya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan spiritualitas keagamaan.

4.1.2. Misi

Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.

Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani, sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik; modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, *downsizing* dan *rightsizing*, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.

Dalam rangka mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efektif melayani rakyat, maka penting adanya pemanfaatan Teknologi Informasi secara lebih optimal. Perwujudan *e-government* sudah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat dan transparan berbasis TIK serta membuka akses informasi publik dan mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.

Misi ini bermakna terbangunnya infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan kunci utama untuk penguatan daya saing suatu daerah. Target pemerintah daerah dan tingginya ekspektasi masyarakat atas layanan infrastruktur yang andal dan berkualitas tentu harus direspons dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan terpadu dari berbagai sektor demi menciptakan kawasan yang tidak hanya terbangun, melainkan juga terintegrasi sehingga mampu berkembang dan memberi manfaat yang maksimal kepada masyarakat.

Untuk menjamin keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, pemerintah daerah harus melakukan peningkatan keterpaduan rencana dan program berbasis pendekatan wilayah. Pengembangan infrastruktur harus mempertimbangkan rencana tata ruang wilayah dan kapasitas daya dukung lingkungan melalui kajian lingkungan hidup strategis. Keterpaduan pengembangan infrastruktur berwawasan lingkungan akan meningkatkan penyediaan air baku untuk semua kebutuhan, kinerja jaringan irigasi, kapasitas pengendalian daya rusak air, kemantapan jalan, konektivitas antar wilayah, kebutuhan hunian dengan prasarana dan sarana pendukung, penyediaan sanitasi layak (pengelolaan limbah dan sampah), serta penanganan *backlog* rumah hunian dan kualitas infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan.

3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.

Misi ini memiliki makna pembangunan ekonomi rakyat yang kokoh dan maju yaitu adanya hasil-hasil pembangunan yang tidak hanya tampak dari segi kuantitas melainkan juga secara kualitas yang dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi berkeadilan dapat didefinisikan sebagai suatu proses mendirikan atau membentuk dengan dilandasi nilai-nilai kebenaran, tidak bersifat sewenang-wenang, bersifat proporsional namun tetap memiliki keberpihakan terhadap pihak yang lemah. Dalam konsep ekonomi, artinya masyarakat mendapat kesempatan yang luas dan setara dalam memperoleh kesejahteraan kehidupan. Konsep pertumbuhan ekonomi berkeadilan di Kabupaten Tegal dikemas dalam *Triple track strategy*, yang terdiri dari *pro-growth* (pertumbuhan ekonomi); *pro-poor* (mengentaskan kemiskinan); dan *pro-job* (penciptaan lapangan kerja/ penurunan pengangguran). *Pro-Growth Strategy* juga mencakup strategi pemberdayaan kelompok masyarakat yang memiliki usaha pada sektor-sektor pertanian, industri pengolahan dan pariwisata. *Pro-growth* selanjutnya diharap dapat mendorong program pengentasan kemiskinan atau *Pro-poor* dan penciptaan lapangan kerja atau *Pro-job*.

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals (SDGs)*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil *World Summit 2005* menyebut ketiga hal dimensi tersebut saling terkait dan merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi, diharapkan tidak mengorbankan aspek-aspek sosial dan juga tidak menimbulkan gradasi lingkungan (*Environmental Gradient*). Penerapan konsep pembangunan ekonomi berkelanjutan, terutama pada sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi tinggi yaitu pertanian, perdagangan, pariwisata dan industri pengolahan harus memperhatikan

aspek-aspek sosial dan lingkungan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan, program dan kegiatannya.

4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi ini memiliki makna peningkatan kualitas hidup manusia untuk membentuk karakter dan kualitas sumberdaya manusia yang pintar, sehat, sejahtera dan berakhlak mulia melalui penyelenggaraan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang merata dan bermutu. Instrumen dasar dalam penguatan layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial adalah dengan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah perangkat ampuh dalam meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan dan sosial, serta harus dilaksanakan secara kolaboratif dengan lintas sektor. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, pengurangan kemiskinan dan pengangguran menjadi tujuan utama dalam implementasi Misi keempat ini, dengan sasaran antara lain peningkatan derajat pendidikan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, pengendalian pertumbuhan penduduk, pemberdayaan dan pembangunan gender serta peningkatan kualitas pemuda dan olahraga.

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, antara lain dengan pemanfaatan atas hasil pengkajian kelitbang untuk dapat diterapkan dalam rangka mendukung program-program bidang pendidikan dan kesehatan. Pemanfaatan dan dukungan teknologi informasi juga menjadi faktor yang penting dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup aktivitas yang saling berkaitan yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis. Untuk itu, pemanfaatan teknologi informasi pada upaya peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa unit kerja/organisasi merupakan satu kesatuan kesatuan yang utuh dan saling berhubungan dalam proses kerjanya sebagai suatu sistem.

5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Misi ini memiliki makna untuk mewujudkan ketertiban umum dengan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat agar dapat tinggal di lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis sehingga mampu menjalankan kehidupannya secara layak dan bermartabat. Dimensi sosial dalam kehidupan, meniscayakan penciptaan sebuah penataan sistem yang mewadahi dinamika kemasyarakatan. Ini dilakukan dengan terus memperkuat kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Aplikasinya bisa dilakukan secara berjenjang berdasarkan stratifikasi kehidupan sosial, budaya dan kearifan lokal.

Upaya yang dilakukan antara lain melalui peningkatan dialog dan kerjasama umat beragama dan antar umat beragama, penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog antar warga, peningkatan upaya penegakan perda, peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana, penanggulangan bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel, perlindungan dan pemanfaatan seni budaya dan peningkatan promosi seni budaya.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan derivasi dari visi dan misi Kabupaten Tegal yang telah disusun. Tujuan merupakan usaha yang dilakukan untuk dapat mewujudkan kondisi yang diharapkan pada akhir periode RPJMD. Sementara sasaran merupakan kondisi yang diinginkan dapat terwujud pada akhir periode RPJMD. Sasaran lebih bersifat spesifik dan terukur karena memuat juga indikator kinerja sasaran. Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran menurut masing-masing misi dalam RPJMD.

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, Akuntabel dan Efektif melayani Rakyat.

Misi I memiliki tujuan Mewujudkan Transparansi, Akuntabilitas, dan Budaya Antikorupsi dalam Pemerintahan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Misi I memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator sasarannya Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dengan indikator sasarannya Nilai SAKIP Kabupaten.
- c. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.
- d. Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah dengan indikator sasarannya Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

2. Memperkuat Daya Saing Daerah melalui Pembangunan Infrastruktur yang Andal, Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan.

Misi II memiliki tujuan Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap yang Berwawasan Lingkungan. Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu:

- 1) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap dengan indikator sasarannya yaitu Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap dan Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang Layak.
- 2) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan dengan indikator sasarannya Rasio Konektivitas Kabupaten.
- 3) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator sasarannya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

3. Membangun Perekonomian Rakyat yang Kokoh, Maju, Berkeadilan dan Berkelanjutan.

Misi III memiliki tujuan Mewujudkan Perekonomian Rakyat yang Kuat Berbasis Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi. Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya Produktivitas Sektor Pertanian dengan indikator sasaran Laju PDRB sektor Pertanian.
- b. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri Pengolahan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Industri.
- c. Meningkatnya Produktivitas Pariwisata dengan indikator sasaran Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten.
- d. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perdagangan dengan indikator sasaran Laju PDRB Sektor Perdagangan.

4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui Penguatan Layanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial dengan Memanfaatkan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Misi IV memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Tujuan ini memiliki 4 (empat) sasaran yaitu :
 - 1) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Pendidikan.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat dengan indikator sasaran Indeks Kesehatan.
 - 3) Meningkatnya Pemberdayaan Gender dengan indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
 - 4) Meningkatnya Produktivitas Pemuda dengan indikator sasaran Wirausaha Muda Berbasis Kinerja Bisnis.
- b. Menekan Laju Kemiskinan. Tujuan ini dapat diukur dengan Indikator Persentase Penduduk Miskin. Tujuan ini memiliki 2 (dua) sasaran yaitu :
 - 1) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.
 - 2) Menekan Laju Tingkat Pengangguran dengan indikator sasaran Tingkat Pengangguran Terbuka.

5. Menciptakan Tata Kehidupan Masyarakat yang Tertib, Aman, Tentram dan Nyaman dengan Tetap Menjaga dan Melestarikan Nilai-Nilai Budaya serta Kearifan Lokal.

Misi V memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Tujuan ini dapat diukur dengan Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terselesaikan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakan yang dapat diukur dengan indikator Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditegakan.
- b. Menurunnya Resiko Bencana. Tujuan ini dapat diukur dengan Indeks Risiko Bencana. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Menurunkan Resiko Bencana dengan indikator sasaran Indeks Kapasitas Daerah.
- c. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan. Tujuan ini dapat diukur dengan indikator Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemanfaatan Kebudayaan. Tujuan ini memiliki sasaran Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan dengan sasaran indikator Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut diatas dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 4. 1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024
VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET				Kondisi Akhir
		2020	2022	2023	2024	2024	
MISI 1: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat							
Tujuan: 1.1 Mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan budaya antikorupsi dalam pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	63,69	64,69	65,19	65,69	65,69	
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	2,4	2,5	2,6	2,6	
	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,61	82,15	84,83	86,2	86,2	
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai SAKIP Kabupaten	63,61	67,61	70,61	73,61	73,61	
Sasaran 1.1.3: Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
Sasaran 1.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	72,24	76,42	78,31	80,56	80,56	
MISI 2: Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan							
Tujuan 2.1 Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur Wilayah Mantap berwawasan Lingkungan	70,17	77,73	80,04	82,12	82,12	
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum yang Mantap	71,45	80,09	82,12	83,78	83,78	
	Persentase Infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang layak	67,11	74,23	79,41	84,8	84,8	
Sasaran 2.1.2.Meningkatnya Sistem jaringan/konektivitas perhubungan	Rasio Konektivitas Kabupaten	75,2	75,3	75,4	75,5	75,5	
Sasaran 2.1.3.Meningkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	55,05	55,33	55,48	55,83	55,83	

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET			Kondisi Akhir
		2020	2022	2023	2024	2024
MISI 3: Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan						
Tujuan 3.1. Mewujudkan perekonomian rakyat yang kuat berbasis pertanian, industri pengolahan dan pariwisata	Pertumbuhan Ekonomi	-1,46	3,59-5,20	4,2 - 5,35	4,85 - 5,45	4,85 - 5,45
Sasaran 3.1.1. eningkatkan Produktifitas Sektor Pertanian	Laju PDRB Sektor Pertanian	2,18	2,75	2,87	3,23	3,23
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Laju PDRB Sektor Industri Pengolahan	-0,46	1,56	2,74	3,78	3,78
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Rasio PAD sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten	1,85	1,99	2,23	2,33	2,33
Sasaran 3.1.4. Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Laju PDRB Sektor Perdagangan	-4,2	2,75	3,23	4,56	4,56
MISI 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi						
Tujuan 4.1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	68,39	69,43	70,13	70,83	70,83
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	86,85	87,03	87,12	87,21	87,21
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,546	0,556	0,558	0,56	0,56
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,794	0,801	0,802	0,804	0,804
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,3	70,16	70,8	71,4	71,4
Sasaran 4.1.3. Meningkatnya Produktifitas Pemuda	Jumlah wirausaha muda pemula berbasis kinerja	100	300	400	500	500
Tujuan 4.2. Menekan laju kemiskinan	Persentase penduduk miskin	8,14	8,45 - 8,12	8,35 - 8,05	8,25 - 7,89	8,25 - 7,89
Sasaran 4.2.1. Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,08	0,98	0,82	0,78	0,78
	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,19	0,15	0,12	0,10	0,10

TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET			Kondisi Akhir
		2020	2022	2023	2024	2024
Sasaran 4.2.2. Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,82	10,21 - 9,42	10,12 - 9,14	9,85 - 8,85	9,85 - 8,85
MISI 5: Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal						
Tujuan 5.1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan	82,66	86,00	88,00	90,00	90,00
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	82,66	86,66	88,66	90,66	90,66
Tujuan 5.2. Menurunnya Resiko Bencana	Indeks Risiko Bencana	183	177,71	174,62	172,12	172,12
Sasaran 5.2.1. Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks Kapasitas Daerah	0,60	0,8	0,89	0,89	0,89
Tujuan 5.3. Meningkatkan Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	44,74	55,27	63,16	73,69	73,69
Sasaran 5.3.1. Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan	57,5	65,5	70,5	75,5	75,5

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.1.4. Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2019-2024 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima;

Mewujudkan sebuah pelayanan yang mudah cepat dan transparan kepada masyarakat, melalui pelayanan satu pintu, diwujudkan dengan menciptakan satu pusat sistem layanan terpadu, merupakan muara dari berbagai sistem pelayanan yang tersebar di berbagai instansi dalam sebuah *mall* pelayanan publik.

2. Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat;

Sebuah program penumbuhan wirausaha dengan upaya yang terstruktur dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bukan hanya membuat barang dan jasa tetapi mengembangkan keterampilan menciptakan transaksi untuk membuat nilai tambah, dan menumbuhkan kemampuan menarik peluang bisnis beserta dengan risikonya, dengan mewujudkan peluang berwirausaha secara nyata akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.

3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang serta Pengembangan Wilayah;

Strategi yang akan dilakukan adalah pemeliharaan jalan antara lain dengan cara pendayagunaan mandor jalan dan unit reaksi cepat penambalan jalan untuk mengantisipasi secara cepat setiap kerusakan jalan yang terjadi dan pemilihan jenis konstruksi jalan yang lebih tahan terhadap kerusakan serta mulai melengkapi jalan dengan konstruksi drainase. Selain itu dilakukan pengembangan wilayah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kawasan yang progresif. Strategi yang dilakukan adalah mempersiapkan prasyarat *project-project* dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang.

4. Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh dan Rumah Sehat bagi Warga Miskin;

Upaya pengurangan luas Kawasan kumuh merupakan upaya kolaboratif baik Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Desa dan para pihak swasta. Upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat melalui Program Bantuan Kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat dan Bantuan RTLH melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Upaya Pemerintah Provinsi melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Desa RTLH. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah dengan **Program Kampung Ora Kumuh**. Diharapkan Dana Desa dari Pemerintah Desa juga fokus pada penanganan kumuh. Dengan upaya kolaborasi ini kawasan kumuh akan tuntas ditangani dengan cepat.

5. Penanganan Dampak Covid-19;

Penanganan dampak *covid-19* tetap perlu dilakukan dalam periode perencanaan pasca tahun 2020. Penanganan dampak *covid-19* dilakukan terhadap penanganan lanjutan *covid-19* (kuratif) berupa upaya penjaminan kualitas kesehatan publik. Penanganan lanjutan *covid-19* dilakukan dengan menjamin setiap penduduk Tegal yang terinfeksi atau berpotensi terinfeksi. Pemulihan sosial pasca *covid-19* dilakukan melalui upaya pemenuhan Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*). Sementara pemulihan ekonomi pasca *covid-19* dilakukan melalui kebijakan khususnya terkait stimulus ekonomi

masyarakat mulai pelaku ekonomi skala besar hingga kecil harus dikeluarkan melalui berbagai program/kegiatan. Transformasi ekonomi wilayah potensial melalui digitalisasi ekonomi, kolaborasi ekonomi hingga inovasi implementasi budaya kerja baru (*new normal*).

6. Penataan Kota Slawi;

Secara jaringan infrastruktur transportasi, Kota Slawi terdiri dari 9 koridor utama. Penataan Kota Slawi selain harus memberikan makna pada kota (*city branding*), juga harus memperhatikan 3 aspek yaitu Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi. Aspek Aksesibilitas meliputi jaringan jalan, jaringan, drainase dan prasarana sarana utilitas (PSU). Aspek Amenitas meliputi kelengkapan jalan seperti jalur, rabu, parking area dan taman untuk menambah keindahan dan identitas sebuah koridor. Sedangkan aspek atraksi meliputi kelengkapan dan atraksi serta aktifitas manusia untuk mengisi ruang – ruang yang telah sediakan. Pada RPJMD perubahan penataan kota slawi akan focus pada 2 Koridor, yaitu koridor 1 dan 2 yang lebih diwarnai sebagai pusat pemerintah dan ruang public. Diharapkan dengan Penataan Kota Slawi akan dapat memberikan kemanfaatan pemicu pertumbuhan ekonomi kawasan penyangga Kota Slawi.

Dalam RKPD 2023 lanjutan penataan kota slawi masih tetap dilaksanakan melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan lengkap dengan drainase dan median jalan dengan hiasan desain sarpras pendukung yang memiliki nilai estetika.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

Peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan dengan memperbaiki manajemen pengelolaan sampah, penanganan sampah dilakukan dengan penyediaan armada, TPS, TPS Terpadu dan Pembuatan TPA baru dengan sistem *sanitary landfill*, sedangkan pengurangan sampah dilakukan dengan upaya pengurangan sampah difokuskan untuk mengurangi sampah sejak dari sumbernya pada skala komunal atau kawasan untuk mengurangi beban sampah yang dibuang ke TPA. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah organik dan anorganik melalui pendekatan 3R yaitu *reduse*, *reuse* dan *recycle* adalah hal yang harus segera dilaksanakan agar dilakukan dengan penyelenggaraan, salah satunya dengan Program Desa Merdeka Sampah. Program Desa Merdeka sampah merupakan program yang didesain sebagai bantuan keuangan kepada desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam melakukan pengelolaan sampah sehingga akan mengurangi timbunan sampah.

8. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Dalam penguatan integritas, selurh aspek perlu dikuatkan tersebut meliputi Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. penekanan dalam penguatan integritas pemerintahan adalah bagaimana bisa *smart* dalam berpemerintahan. Penguatan seluruh aspek integritas harus bermuatan *Smart*. Oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi salah satu prasyarat akselerasi penguatan integritas ini antara lain dalam penerapan *e-office* dalam aspek tata kerja pemerintahan.

9. Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya;

Pembinaan olahraga diarahkan dengan memberikan sebesar besarnya kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam rangka mewujudkan cita citanya menjadi olahragawan yang andal dan profesional, yang bisa menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Tegal. Program ini dilakukan dengan upaya

memberikan perhatian kepada olahragawan serta memberikan insentif dan penghargaan kepada atlet yang layak sesuai prestasinya. Pemberdayaan Pemuda diarahkan untuk mengoptimalkan kepeloporan pemuda dan pengembangan pemuda kreatif. Sementara pelestarian budaya diarahkan pada upaya pelestarian, pemajuan dan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, permainan tradisional, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa dan ritus, hingga cagar budaya.

4.2. Prioritas dan Pembangunan Tahun 2023

4.2.1. Sasaran dan Prioritas Nasional Tahun 2023

Kondisi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian, ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejala lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif. Perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif, kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus mebaik. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 (RKP 2023) mempunyai tema pembangunan Nasional **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang kemudian dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional yaitu :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan Pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau;
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 menetapkan sejumlah sasaran pembangunan, yakni:

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,3–5,9 persen,
2. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3–6,0 persen,
3. Tingkat Kemiskinan 7,5–8,5 persen,
4. Rasio Gini 0,375–0,378,
5. Indeks Pembangunan Manusia 73,31–73,49,
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02 persen,
7. Nilai Tukar Petani 103–105, dan
8. Nilai Tukar Nelayan 106–107

4.2.2. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang akan dituangkan dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sehingga Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada penyelesaian dan penuntasan program pembangunan daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dalam mewujudkan keselarasan pembangunan dan memaksimalkan pencapaian pembangunan wilayah Kabupaten Tegal

sebagai bagian dan satu kesatuan pembangunan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, maka keberhasilan pembangunan Provinsi juga dipengaruhi oleh dukungan dan keberhasilan pembangunan dari daerah Kab/Kota. Pembangunan pada tahun 2023 di Provinsi Jawa Tengah memiliki tema **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”**. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 didasarkan pada 7 isu strategis yang menjadi fokus pembangunan tahun 2022 antara lain:

1. Penanggulangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha
4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
5. Kedaulatan Pangan dan Energi
6. Kesenjangan Wilayah
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah

Berdasarkan tema dan isu strategis Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 maka prioritas Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 antara lain:

1. **Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana**, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani melalui antara lain hilirisasi berbasis industri, peningkatan kualitas kelembagaan petani berbasis korporasi, peningkatan akses permodalan dan subsidi bunga kredit, dukungan jaminan usaha/asuransi, pengembangan kawasan pertanian/food estate, peningkatan peran petani gurem dan buruh tani melalui penguatan database, serta peningkatan prasarana dan sarana pertanian;
 - b. Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan melalui jaminan kemudahan perijinan, peningkatan akses permodalan, asuransi nelayan, penguatan kelembagaan nelayan berbasis korporasi, meningkatkan nilai tambah produk perikanan melalui optimalisasi Unit Pengolahan Ikan (UPI), serta peningkatan kualitas prasarana sarana perikanan berbasis teknologi;
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi lindung hutan;
 - d. Peningkatan ketahanan pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah, pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal sebagai sumber pemenuhan pangan keluarga, penanganan desa rawan pangan, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, diversifikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman, serta mutu dan keamanan pangan segar;
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil menengah, serta koperasi melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, standarisasi produk dan inovasi produk,

pengembangan inovasi teknologi produksi, pengembangan bahan baku industri substitusi impor, penguatan keperantaraan akses pembiayaan dan pemasaran terutama pemasaran berbasis digital, keperantaraan usaha kecil ke usaha menengah/besar, serta penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;

- f. Peningkatan eco socio tourism berbasis masyarakat dan lingkungan hidup melalui perbaikan prasarana sarana destinasi pariwisata, peningkatan promosi pariwisata, peningkatan aksesibilitas, serta optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata;
 - g. Peningkatan nilai penanaman modal melalui penyempurnaan sistem dan layanan perijinan yang mudah, murah, cepat, transparan, dan akuntabel, pemberian fasilitasi kemudahan perijinan berusaha, peningkatan upaya pengawalan kepemilikan dan pengawasan penanaman modal, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta penguatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dan dunia usaha;
 - h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan serta antar wilayah pantura, tengah, dan pansela;
 - i. Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui konservasi DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumberdaya air, perbaikan kualitas air sungai danau waduk, peningkatan tampungan air baku, pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir dan rob, rehabilitasi kawasan pesisir dan laut, pengelolaan sampah berbasis 3Ng (Ngelongi, Nggunakke, dan Ngolah), penerapan *Good Mining Practice*, konservasi energi, pemanfaatan energi baru terbarukan, serta penguatan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dengan pendekatan pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim;
 - j. Peningkatan ketahanan bencana melalui harmonisasi regulasi penanggulangan bencana di tingkat daerah, dokumentasi sejarah kebencanaan, penguatan literasi kebencanaan, perencanaan penanggulangan bencana, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembiayaan dan penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana, serta peningkatan kemitraan antar daerah dan antar lembaga dalam pengurangan risiko bencana;
2. **Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE)**, dengan fokus pada:
- a. Penyediaan *basic need access* (akses kebutuhan dasar) untuk penduduk miskin perdesaan dan perkotaan utamanya pada kelompok rumah tangga petani, nelayan, buruh, pelaku usaha mikro kecil (UMK), dan kelompok rentan lainnya baik bersifat langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin antara lain

penyediaan layanan dasar untuk masyarakat miskin (Rumah Sederhana Layak Huni/RSLH, jamban, akses air bersih, dan listrik murah);

- b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, utamanya melalui pendampingan dan pengembangan daya saing usaha mikro dan kecil yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dan rentan miskin baik secara individu maupun berbasis kelompok (*community based*), pengembangan aktivitas ekonomi baru berbasis pada potensi lokal, pengembangan kewirausahaan pemuda yang berkelanjutan, dan pengembangan ekonomi digital;
- c. Penguatan tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan terutama melalui verifikasi dan validasi data berbasis masyarakat dan pemanfaatan data di tingkat daerah, penguatan peran Puskesmas dalam keperantaraan penyediaan layanan dasar dan perlindungan sosial, serta penguatan sinergi kebijakan dan program baik secara horisontal maupun vertikal;
- d. Pengurangan pengangguran melalui peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, penciptaan atau perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja, jaminan sosial, kesejahteraan pekerja, pencegahan dan penyelesaian hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan, peningkatan kepatuhan dalam menerapkan peraturan ketenagakerjaan, penanganan kasus ketenagakerjaan, pelayanan pengawasan tenaga kerja, serta membangun kesatuan sistem demand dan supply side tenaga kerja.

3. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing, dengan fokus pada

- a. Penuntasan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan melalui pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), peningkatan sarana prasarana pendidikan, penyediaan pendidik dan tenaga pendidik yang merata dan berkualitas, peningkatan budaya baca pada satuan pendidikan dan masyarakat, serta internalisasi nilai-nilai masyarakat melalui agama, budaya, dan kearifan lokal;
- b. Penguatan pembangunan kesehatan paripurna utamanya mitigasi kematian ibu, bayi, dan balita, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, penguatan manajemen dan layanan kesehatan, pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan kesehatan khususnya bagi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, peningkatan respon krisis kesehatan, peningkatan pengetahuan dan perilaku hidup sehat, peningkatan kebugaran masyarakat melalui peningkatan partisipasi olahraga masyarakat, penyediaan sarana prasarana olahraga memadai, peningkatan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan even olahraga;
- c. Peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak, pencegahan terhadap kekerasan

perempuan dan anak, serta penyelenggaraan layanan terpadu korban kekerasan perempuan dan anak;

- d. Pembangunan kependudukan berdasarkan 5 pilar pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengaturan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah, dengan fokus pada:

- a. Pemantapan kualitas pelayanan publik termasuk penerapan pemerintahan digital guna mendukung pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, kolaboratif, dan inovatif, sarana pelayanan publik yang inklusif, open government melalui perkuatan keterbukaan informasi publik, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Penguatan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja, penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu berbasis elektronik, pengendalian internal secara berkala terhadap capaian target indikator kinerja (organisasi dan individu) dan keuangan sebagai dasar dalam pemberian besaran tunjangan kinerja, serta mendorong implementasi kebijakan penguatan sistem integritas internal instansi;
- c. Perwujudan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik melalui optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan mampu menjalankan proses bisnis menuju tercapainya tujuan dan sasaran kinerja, pengembangan kompetensi ASN yang berorientasi pada pencapaian talenta dan kinerja, serta optimalisasi peta proses bisnis pemerintahan daerah;
- d. Penguatan kondusivitas wilayah melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan termasuk pendidikan politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini, serta penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal;
- e. Pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah secara lebih progresif, realistis, dan kondusif melalui optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan dana transfer, dan penguatan peran BUMD.

Adapun target sasaran pembangunan atau Indikator Kinerja Utama Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 antara lain:

1. Persentase penurunan konflik SARA sebesar 15,00 persen;
2. Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,00;
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,51 – 9,29 persen;
4. Indeks Gini sebesar 0,34;
5. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,63 – 4,80 persen;
6. Pertumbuhan Ekonomi antara 5,00 – 5,60 persen;
7. Inflasi pada angka $3,0 \pm 1$ persen;
8. PDRB per kapita sebesar 43,32 juta rupiah;
9. Indeks Williamson sebesar 0,56;

10. Nilai Tukar Petani 104,05;
11. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 72,75;
12. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,21; dan
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,57

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis actual yang kemungkinan terjadi ditahun 2023 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2021-2022 sampai dengan triwulan II tahun berjalan dan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 serta RKP dan program strategis nasional Tahun 2023 sebagai satu kesinambungan integrasi pembangunan untuk meningkatkan (i) kesejahteraan masyarakat; (ii) pelayanan umum; dan (iii) daya saing daerah.

A. Kebijakan Umum Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka menjaga sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah, RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023 disusun dengan:

1. Memedomani Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Memedomani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
5. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
6. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
7. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Memperhatikan pokok-pokok kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2023;
11. Memperhatikan arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2023;

12. Memedomani sasaran dan prioritas tahunan sebagaimana terdapat dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal 2019-2024, serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2021 dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 triwulan ke-II;
13. Memperhatikan kewenangan dan tugas fungsi Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
14. Memperhatikan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals / SDGs*) Tahun 2016-2030;
15. Rencana pembangunan disusun dalam program/kegiatan yang fokus pada prioritas dan sasaran, bermanfaat langsung bagi masyarakat, terpadu lintas sektor, menyelesaikan permasalahan pembangunan, berorientasi pada *output, outcome, benefit* dan *impact* yang terukur;
16. Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten guna menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata;
17. Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk menjamin afirmasi pembangunan yang responsif gender.

B. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2023

Pada dasarnya RKPD Kabupaten Tegal tahun 2023 merupakan penjabaran dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 dengan memedomani sasaran dan prioritas kebijakan tahun berkenaan. Meskipun begitu RKPD juga harus *responsive* terhadap kondisi *actual* yang terkini sebagai penyempurna sasaran dan prioritas RPJMD tahun berkenaan yang telah dirumuskan sebelumnya. Oleh karena itu isu strategi pembangunan yang mungkin masih dan akan terjadi di tahun 2023 harus teridentifikasi dan ditangani dalam muatan kebijakan RKPD ini. Adapun isu strategis Pembangunan Kabupaten Tegal tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Keterkaitan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

No	Isu Kabupaten Tegal	Isu Provinsi Jawa Tengah
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknologi Informasi	Tata Kelola Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah
2	Pemerataan Infrastruktur Dasar	Kesenjangan Wilayah
3	Kesehatan Lingkungan Hidup	Keberlanjutan Pembangunan dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam
4	Pemulihan Ekonomi Lokal Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Kedaulatan Pangan dan Energi
5	Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
6	Menekan Laju Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan
7	Menekan Laju Pengangguran	Daya Saing Ekonomi dan Peningkatan Kesempatan Berusaha

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

C. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2023

Sebagai upaya pencapaian target sasaran pembangunan dan mempertimbangkan isu strategis yang dihadapi, maka pembangunan daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 diarahkan untuk **"Pengembangan Infrastruktur Ekonomi, Budaya, dan Lingkungan Hidup yang Nyaman"**. Berdasarkan tema tersebut arah kebijakan tahun 2023 diarahkan pada aspek penumbuhan dan akselerasi perekonomian wilayah. Berbagai infrastruktur penunjang ekonomi baik skala kecil maupun skala besar perlu dipenuhi kebutuhannya berdasarkan skala prioritas. Pada tahap ini juga pengembangan seni-budaya dikolaborasikan dengan pengembangan sektor pariwisata.

Pembangunan dan pengembangan obyek/destinasi wisata mulai digerakkan khususnya pada aspek pembangunan dan penataan fasilitas dan jasa pariwisata. Untuk mendukung kualitas lingkungan hidup, maka *eco-tourism* menjadi tema pembangunan pariwisata.

Adapun prioritas kebijakan tahun 2023 antara lain:

- 1) **Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK; fokus kebijakan pada:**
 - a) Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
 - b) Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
 - c) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d) Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
- 2) **Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup; fokus kebijakan pada:**
 - a) Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah
 - b) Penataan ruang kota dan permukiman
 - c) Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
 - d) Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
 - e) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
- 3) **Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
 - b) Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Melalui Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
 - c) Penguatan dan diversifikasi pangan
 - d) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
 - e) penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
 - f) Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
 - g) Pengembangan SDM pariwisata kreatif
 - h) Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
 - i) Pemulihan dan pengembangan UMKM
- 4) **Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
 - b) Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
 - c) Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
 - d) Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru

- 5) **Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender; fokus kebijakan pada:**
 - a) Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
 - b) Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
 - c) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
- 6) **Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
 - b) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
 - c) Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
- 7) **Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja; fokus kebijakan pada:**
 - a) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
 - b) Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
 - c) Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
- 8) **Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
 - b) Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
 - c) Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
- 9) **Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal; fokus kebijakan pada:**
 - a) Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
 - b) Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

D. Sasaran Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2023

Sasaran pembangunan RKPD tahun 2023 berdasarkan perubahan RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 fokus pada 20 prioritas sasaran pembangunan dengan antara lain:

- 1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat menjadi 84,83% dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi 2,65;
- 2) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja yang ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten menjadi 65,21;
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditandai dengan Opini BPK yang masih WTP;
- 4) Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah yang ditandai dengan peningkatan Indeks ASN menjadi 60,31;
- 5) Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap yang ditandai dengan peningkatan persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap menjadi 81,66 % dan persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak menjadi 78,02%;
- 6) Meningkatnya Sistem Jaringan/Konektivitas Perhubungan yang ditandai dengan peningkatan rasio konektivitas kabupaten menjadi 75,40;

- 7) Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 55,48%;
- 8) Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian yang ditandai dengan peningkatan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Pertanian sebesar 2,78 - 3,46%;
- 9) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Industri sebesar 2,72-3,68%;
- 10) Meningkatnya Produktifitas Pariwisata yang ditandai dengan peningkatan Rasio PAD Sektor Pariwisata terhadap PAD Kabupaten menjadi 2,23%
- 11) Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan yang ditandai dengan peningkatan laju PDRB Sektor Perdagangan sebesar 2,95-4,48%;
- 12) Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pendidikan menjadi 0,558;
- 13) Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat yang ditandai dengan peningkatan Indeks Kesehatan menjadi 0,802;
- 14) Meningkatnya Pemberdayaan Gender yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 70,80%;
- 15) Meningkatnya Produktifitas Pemuda yang ditandai dengan peningkatan Wirausaha Muda Pemula Berbasis Kinerja sejumlah 500 wirausaha;
- 16) Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan yang ditandai dengan penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan menjadi 0,82% dan Indeks Keparahan Kemiskinan menjadi 0,12 %;
- 17) Menekan Laju Tingkat Pengangguran yang ditandai dengan penurunan Tingkat Pengangguran terbuka menjadi 10,12%-9,14%
- 18) Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan menjadi 88,66%;
- 19) Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Kapasitas Daerah menjadi 0,89;
- 20) Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan yang ditandai dengan meningkatnya Persentase Seni dan Kesenian yang dilestarikan menjadi 62,34%.

Adapun keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2023

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja		Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah		Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Meningkatnya Kualitas Manajemen Kepegawaian Daerah		Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem
	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penataan ruang kota dan permukiman
Meningkatnya Sistem Jaringan / Konektivitas Perhubungan		Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan
		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan
Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	Penyiapan dan Pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan		Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan ramah lingkungan
		Penguatan dan diversifikasi pangan
		Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan
Meningkatnya Produktifitas Pariwisata		penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan
		Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata
		Pengembangan SDM pariwisata kreatif
		Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era tatanan baru
Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan		Pemulihan dan pengembangan UMKM
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat berbasis TIK
		Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK
		Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era tatanan baru
Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Pengendalian kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana
Meningkatnya Produktifitas Pemuda		Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda
		Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat
Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin
		Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta

Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah	Fokus Kebijakan
		Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
		Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat
Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja
		Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan
		Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja
Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat	Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat beragama
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana		Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah
		Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar
Meningkatnya Pelestarian dan Pewarisan Kebudayaan	Optimalisasi Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal	Penguatan Pemahaman Budaya dan kearifan lokal di Lingkungan Sekolah
		Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Guna mendukung tercapainya sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, ditetapkan program pembangunan prioritas sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut:

Tabel 4. 4
Sasaran, Prioritas Daerah dan Program Pembangunan Prioritas Tahun 2023

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis tik	Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan adiwerna	76,37	79,87	40.000	Kecamatan adiwerna
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan balapulang	79,29	82,79	40.000	Kecamatan balapulang
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan bojong	79,62	83,12	40.000	Kecamatan bojong
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan bumijawa	87,53	91,03	40.000	Kecamatan bumijawa
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan dukuhturi	79,37	82,87	45.000	Kecamatan dukuhturi
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan dukuhturi	77,44	80,94	40.000	Kecamatan dukuhturi
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan jatinegara	79,70	83,20	40.000	Kecamatan jatinegara
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan kedungbanteng	82,00	85,00	40.000	Kecamatan kedungbanteng

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan kramat	78,98	82,48	40.000	Kecamatan kramat
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan lebaksiu	77,25	82,25	40.000	Kecamatan lebaksiu
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan margasari	77,40	80,90	39.624	Kecamatan margasari
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan pagerbarang	77,63	81,13	40.000	Kecamatan pagerbarang
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan pangkah	78,74	82,24	40.000	Kecamatan pangkah
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan slawi	79,67	83,17	40.000	Kecamatan slawi
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan suradadi	79,76	83,26	40.000	Kecamatan suradadi
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan talang	73,20	76,70	40.000	Kecamatan talang
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan tarub	80,55	84,05	40.000	Kecamatan tarub
				Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	IKM kecamatan warureja	77,40	80,90	40.000	Kecamatan warureja

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan adiwarna	0,00	4,76	30.000	Kecamatan adiwarna
					Persentase desa maju kecamatan adiwarna	9,52	14,29		Kecamatan adiwarna
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan balapulang	0,00	9,52	30.000	Kecamatan balapulang
					Persentase desa maju kecamatan balapulang	5,00	9,52		Kecamatan balapulang
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bojong	12,00	0,18	30.000	Kecamatan bojong
					Persentase desa maju kecamatan bojong	0,29	0,35		Kecamatan bojong
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bumijawa	0,00	5,56	30.000	Kecamatan bumijawa
					Persentase desa maju kecamatan bumijawa	11,11	22,22		Kecamatan bumijawa
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhturi	0,00	10,00	226.000	Kecamatan dukuhturi
					Persentase desa maju kecamatan dukuhturi	10,00	10,00		Kecamatan dukuhturi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhturi	0,00	5,56	30.000	Kecamatan dukuhturi
					Persentase desa maju kecamatan dukuhturi	5,56	11,11		Kecamatan dukuhturi

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan jatinegara	0,00	6,00	30.000	Kecamatan jatinegara
					Persentase desa maju kecamatan jatinegara	6,00	12,00		Kecamatan jatinegara
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan kedungbanteng	0,00	0,10	30.000	Kecamatan kedungbanteng
					Persentase desa maju kecamatan kedungbanteng	0,00	0,10		Kecamatan kedungbanteng
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan kramat	0,00	5,26	1.090.000	Kecamatan kramat
					Persentase desa/kelurahan maju kecamatan kramat	16,00	26,00		Kecamatan kramat
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan lebaksiu	7,69	7,69	30.000	Kecamatan lebaksiu
					Persentase desa maju kecamatan lebaksiu	15,00	23,00		Kecamatan lebaksiu
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan margasari	8,00	15,00	35.300	Kecamatan margasari
					Persentase desa maju kecamatan margasari	46,00	54,00		Kecamatan margasari
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan pagerbarang	0,00	8,00	30.000	Kecamatan pagerbarang

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					Persentase desa maju kecamatan pagerbarang	8,00	24,00		Kecamatan pagerbarang
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan pangkah	0,00	4,00	30.000	Kecamatan pangkah
					Persentase desa maju kecamatan pangkah	4,00	9,00		Kecamatan pangkah
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan slawi	0,00	20,00	5.030.000	Kecamatan slawi
					Persentase desa maju kecamatan slawi	60,00	80,00		Kecamatan slawi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan suradadi	0,00	9,00	30.000	Kecamatan suradadi
					Persentase desa maju kecamatan suradadi	9,00	18,00		Kecamatan suradadi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan talang	0,00	0,00	30.000	Kecamatan talang
					Persentase desa maju kecamatan talang	0,00	5,26		Kecamatan talang
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan tarub	0,00	5,00	60.000	Kecamatan tarub
					Persentase desa maju kecamatan tarub	20,00	25,00		Kecamatan tarub
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan warureja	0,00	8,00	30.000	Kecamatan warureja

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					Persentase desa/kelurahan maju kecamatan warureja	17,00	25,00		Kecamatan warureja
				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase tertib dan baik administrasi pengelolaan keuangan dan asset desa	35,00	89,00	6.830.000	Dispermasdes
				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase opd yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	40,00	131.300	Disdukcapil
				Program pendaftaran penduduk	Persentase penduduk ber kartu keluarga	91,67	96,00	3.099.667	Disdukcapil
					Perekaman ktp elektronik	99,68	99,76		Disdukcapil
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki kia	21,80	70,00		Disdukcapil
				Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	96,00	146.450	Disdukcapil
					Persentase penduduk ber akta kematian	68,54	70,79		Disdukcapil
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja	Nilai sakiip kabupaten		Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	65,00	73,44	1.331.959	Bappedalitbang
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Opini bpk		Peningkatan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD	100,00	100,00	2.602.507	Bpkad

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
			keuangan dan aset daerah						
					Persentase ketepatan waktu penerbitan sp2d	100,00	100,00		Bpkad
					Persentase ketepatan waktu penyusunan peraturan daerah & peraturan bupati pertanggungjawaban apbd	100,00	100,00		Bpkad
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio PAD	14,09	15,15	2.549.409	Bappenda
					Rasio piutang pajak daerah	66,26	98,90		Bappenda
					Rasio pajak daerah	30,63	30,68		Bappenda
				Program pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan laporan bmd yang baik dan tepat waktu	62,50	75,00	3.509.020	Bpkad
				Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan bpk ri	91,70	92,00	771.882	Inspektorat
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi	100,00	100,00		Inspektorat
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat kabupaten	39,02	70,00		Inspektorat
				Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase predikat wbk/wbbm berdasarkan penilaian internal	16,67	16,67	719.120	Inspektorat
					Persentase pemenuhan iku perangkat daerah	60,41	70,83		Inspektorat

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					Persentase pd menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	89,58		Inspektorat
Meningkatnya kualitas manajemen kepegawaian daerah	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara		Penguatan kapasitas asn dan penerapan merit sistem	Program kepegawaian daerah	Persentase asn yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,11	4.040.000	Bkd
					Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	95,42		Bkd
					Persentase jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	44,85		Bkd
					Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%)	110,04	288,10		Bkd
					Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	15,68		Bkd
					Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	92,69		Bkd
				Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pns yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	75,01	2.434.499	Bkd
					Persentase pns mengikuti seminar/ workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40	45,01		Bkd

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
Meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang mantap	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik pada daerah irigasi (di) kewenangan kabupaten	58,86	62,57	6.060.000	Dpu
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan akses layanan air minum	61,09	65,55	6.677.314	Dpu
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten	58,42	62,15	11.160.500	Dpu
			Penataan ruang kota dan permukiman	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	0,3	91,11	28.900.000	Dpu
				Program penataan bangunan gedung	Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	76,88	80,24	43.456.821	Dpu
					Rasio bangunan yang memiliki imb	6,50	8,57		Dpu
				Program penyelenggaraan jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	85,50	84.840.000	Dpu
					Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	88,05	92,00		Dpu
				Program penyelenggaraan penataan ruang	Rasio kepatuhan terhadap itr yang diajukan	79,93	89	625.000	Dpu
				Program penataan desa	Persentase sarana dan prasarana desa yang terpenuhi dan baik	55,23	70,23	4.200.000	Dispermasdes

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	69,40	71,53	100.000	Dispermasdes
	Persentase infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang layak			Program pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	2.439.226	Dinas perkimtah
					Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100,00	100,00		Dinas perkimtah
				Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan perumahan tidak layak huni	13,06	20,79	8.605.200	Dinas perkimtah
				Program kawasan permukiman	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	35,47	50,48	5.200.000	Dinas perkimtah
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase ketersediaan psu perumahan	83,31	85,10	14.443.000	Dinas perkimtah
Meningkatnya sistem jaringan / konektivitas perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten		Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase dokumen perencanaan lalu lintas	0,00	60,00	15.606.100	Dishub
					Persentase rekomendasi andalalin	20,00	80,00		Dishub
					Persentase perlintasan ka yang telah di lakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas	32,80	38,00		Dishub

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					Persentase simpang apil standar	0,00	66,67		Dishub
					Persentase pengamanan pengaturan lalu lintas	0,00	100,00		Dishub
					Persentase lokasi titik parkir berizin	65,33	90,33		Dishub
					Persentase juru parkir berizin	73,60	85,60		Dishub
					Rasio fasilitasi penerbitan ijin trayek	76,00	87,00		Dishub
					Persentase pelanggaran perizinan, persyaratan teknis dan laik jalan angkutan	35,00	20,00		Dishub
					Persentase layanan terminal angkutan jalan	31,00	37,00		Dishub
					Persentase kepemilikan uji kendaraan angkutan umum	77,80	84,00		Dishub
					Persentase jalan memiliki perlengkapan jalan	34,49	77,00		Dishub
					Persentase prasarana jalan (lampu penerangan jalan umum)	57,00	89,00		Dishub
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup		Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai peningkatan status mutu air sungai	3,70	11,11	2.243.020	Dlh
					Presentase pengendalian lahan	1,08	16,84		Dlh

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					terkontaminasi limbah b3				
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase peningkatan luas lahan kehati yang terkelola	0	37,50	353.500	Dlh
				Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase penanganan limbah b3	60,00	65,00	277.750	Dlh
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan akses sanitasi/ limbah domestik	94,37	95,97	2.776.813	Dpu
				Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	47,29	54,18	10.509.050	Dlh
					Persentase pengurangan sampah	14,00	23,15		Dlh
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	83,00	14.307.660	Dpu
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Persentase pelaku usaha yang berkomitmen dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup	30,00	50,00	50.000	Dlh
Meningkatnya produktifitas sektor pertanian	Laju pdrb sektor pertanian	Pemulihan dan transformasi sektor pertanian,	Penyiapan dan pengembangan sektor perikanan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (kg.)	1.964.378	2.023.900	767.133	Dkpp

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
		perdagangan, industri, koperasi dan ukm, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	kreatif ramah lingkungan						
					Nilai produksi perikanan tangkap (rp.)	13.608.184	14.020.525		Dkpp
				Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase perairan umum daratan (pud) yang bebas dari destructive fishing	11,11	77,78	146.595	Dkpp
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (kg)	2.730.262	2.792.138	2.215.404	Dkpp
					Nilai produksi perikanan budidaya (rp.000)	145.642.227	150.431.397		Dkpp
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi pengolahan hasil perikanan	5.478.639	5.503.329	234.273	Dkpp
					Nilai produksi pengolahan hasil perikanan (rp.000)	131.189.142	131.780.347		Dkpp
			Penyiapan dan pengembangan sektor pertanian kreatif meliputi tanaman pangan holtikultura, perkebunan dan peternakan ramah lingkungan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.626.673	1.069.182	Dinas tan kp
					Produksi telur (kg.)	10.760.493	11.086.547		Dinas tan kp

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					Produksi susu (kg.)	604.664	622.986		Dinas tankp
					Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (opt)	89,80	89,93	1.012.622	Dinas tan kp
					Persentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi	63,00	67,00		Dinas tan kp
					Luas lahan pertanian organik	2,00	2,00		Dinas tan kp
					Rasio penggunaan alsintan pra panen	62,72	63,24		Dinas tan kp
					Rasio penggunaan alsintan pasca panen	15,51	19,45		Dinas tan kp
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks pertanaman	1,52	1,66	10.158.958	Dinas tan kp
					Aksebilitas jalan usaha tani (km/ha)	2,60	3,70		Dinas tan kp
					Luas lahan sawah lestari	100,00	100,00		Dinas tan kp
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rasio serangan organisme pengganggu tanaman (opt)	< 2,5	< 2,5	90.900	Dinas tan kp
					Rasio penggunaan agen pengendali hayati per luas tanam dalam menekan serangan opt padi	0,00	2,00		Dinas tan kp
				Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	291.133	Dinas tan kp

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					Persentase pengawasan peredaran produk hasil ternak yang aman sehat utruh dan halal/asuh	100	100		Dinas tan kp
				Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	0	20	382.558	Dinas tan kp
					Penumbuhan peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	0,00	2,57		Dinas tan kp
			Penguatan dan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	30,00	224.422	Dinas tan kp
					Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	51,00		Dinas tan kp
				Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	38.146	Dinas tan kp
Meningkatnya produktifitas di sektor industri pengolahan	Laju pdrb sektor industri		Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan	Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam rpip	60,00	80,00	808.000	Disperinaker
				Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (iui) kecil dan industri menengah yang	100,00	100,00	18.108	Disperinaker

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					dikeluarkan oleh instansi terkait				
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (sii nas)	20,00	80,00	34.421	Disperinaker
Meningkatnya produktifitas pariwisata	Rasio pad sektor pariwisata terhadap pad kabupaten		Penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi tujuan wisata produktif (dtw) yang ditetapkan	78,33	90	5.549.040	Disporapar
					Persentase usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata (tdup)	69,00	84,00		Disporapar
									Porapar
			Peningkatan efektifitas pemasaran wisata	Program pemasaran pariwisata	Persentase dtw yang dipromosikan	78,33	90,00	1.500.000	Disporapar
			Pengembangan sdm pariwisata kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase sdm pariwisata yang dibina	50	80	1.100.000	Disporapar
Meningkatnya produktifitas di sektor perdagangan	Laju pdrb sektor perdagangan		Penguatan fungsi pasar tradisional era tatanan baru	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar direhabilitasi	50,00	76,92	2.500.000	Dinas dagkop ukm
					Persentase pasar e-ritribusi	7,69	65,38		Dinas dagkop ukm
					Persentase sarana dan prasaran pendistribusian yang dikelola dengan baik	100,00	100,00		Dinas dagkop ukm
			Pemulihan dan pengembangan umkm	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan	Persentase peningkatan umkm yang bermitra	2,63	4,73	90.900	Dinas dagkop ukm

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				usaha mikro (umkm)					
				Program pengembangan umkm	Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	Persen; kumulatif; iku opd	160000,00	3	631600
Meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat	Indeks pendidikan	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis tik	Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam paud	79,86	79,89	249.998.289	Dinas dikbud
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,28		Dinas dikbud
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100		Dinas dikbud
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00		Dinas dikbud
					Rata-rata nilai kelulusan sd	77,47	77		Dinas dikbud
					Rata-rata nilai kelulusan smp	70,86	74,5		Dinas dikbud
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio guru kelas paud	23,00	15,00	34.145.709	Dinas dikbud

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					Rasio guru kelas tk	3,16	5,82		Dinas dikbud
					Rasio guru kelas sd	19:11	1.30		Dinas dikbud
					Guru mapel pai	3,00	1.90		Dinas dikbud
					Guru mapel pjok	2.90	1.90		Dinas dikbud
					Rasio guru mapel smp	04:38	00:11		Dinas dikbud
					Rasio guru mapel paket a	06:14	06:14		Dinas dikbud
					Rasio guru mapel paket b	22:44	22:44		Dinas dikbud
					Rasio guru mapel paket c	18:14	18:11		Dinas dikbud
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	Indeks kesehatan		Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis tik	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio daya tampung rs terhadap jumlah penduduk	0,092	0,098	6.340.878	Dinas kesehatan
					Persentase rs rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00		Dinas kesehatan
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	99,00		Dinas kesehatan
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00		Dinas kesehatan
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00		Dinas kesehatan
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	92,00		Dinas kesehatan
					Persentase anak usia pendidikan	38,90	60,00		Dinas kesehatan

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
					Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	35,00		Dinas kesehatan
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	57,00		Dinas kesehatan
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	35,00		Dinas kesehatan
					Persentase penderita dm yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	80,00		Dinas kesehatan
					Persentase odgj berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	75,00		Dinas kesehatan
					Persentase orang terduga tbc mendapatkan pelayanan tbc sesuai standar	57,10	75,00		Dinas kesehatan
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi hiv mendapatkan	90,50	98,00		Dinas kesehatan

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					pelayanan deteksi dini hiv sesuai standar				
					Cakupan balita stunting	12,50	12,20		Dinas kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	42,00	90,00		Dinas kesehatan
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah rsud dr soeselo	100	100	26.975.560	Rsud dr soeselo
					Nilai kesehatan kinerja blud rsud soeselo	78,46 (aa)	86 (aa)	137.990.864	Rsud dr soeselo
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah rsud suradadi	100	100	5.838.651	Rsud suradadi
					Nilai kesehatan kinerja blud rsud suradadi	74,06 (a)	77,26 (a)	22.075.000	Rsud suradadi
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	199.000	Dinas kesehatan
					Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	93,10		Dinas kesehatan
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang	30	39,00	903.068	Dinas kesehatan

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					diterbitkan sesuai ketentuan				
					Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100		Dinas kesehatan
			Peningkatan upaya promosi dan pembudayaan hidup sehat era tatanan baru	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs)	95,4	96	293.700	Dinas kesehatan
Meningkatnya pemberdayaan gender	Indeks pemberdayaan gender (idg)	Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga berencana	Program pembinaan keluarga berencana (kb)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate) cpr	67,8	69,34	8.375.204	Dinas p3ap2kb
					Persentase kebutuhan ber-kb yang tidak terpenuhi (unmeet need)	15,27	14,67		Dinas p3ap2kb
Meningkatnya produktifitas pemuda	Jumlah wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis		Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,161	2.070.500	Dinas porapar
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,073		Dinas porapar
			Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat	Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Peningkatan prestasi olahraga	61,00	75,00	4.273.769	Dinas porapar

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
Menurunnya kedalaman dan keparahan kemiskinan	Indeks kedalaman kemiskinan	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin	Program pemberdayaan sosial	Persentase psks perseorangan keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	83,15	442.718	Dinas sosial
			Perluasan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan ppks lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	81,15	2.023.788	Dinas sosial
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase ppks, fakir miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	97,99	100,00	966.581	Dinas sosial
			Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100,00	100,00	914.050	Dispermasdes
				Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	21,89	1.202.272	Dinas p3ap2kb

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
Menekan laju tingkat pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka	Peningkatan kompetensi angkatan kerja dan akselerasi investasi untuk perluasan lapangan kerja	Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja	Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	50.000	Disperinaker
				Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37.990,00	42.410,00	739.320	Disperinaker
					Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	6,40		Disperinaker
			Peningkatan kerjasama ketenagakerjaan	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah	17,82	35,00	220.000	Disperinaker
			Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	57,14	172.061	Dinas pmptsp
				Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	319.413	Dinas pmptsp
				Program pelayanan penanaman modal	Persentase ketepatan waktu perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu	100	100	541.674	Dinas pmptsp

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan perusahaan	61,28	70,28	333.300	Dinas pmptsp
Meningkatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Presentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Peningkatan kualitas keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat	Penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog dan kerjasama antar warga dan umat beragama	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Presentase masyarakat yang memahami ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	80,42	88,66	408.040	Badan kesbangpol
				Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Persentase gangguan kantibmas yang tertangani	85,00	100,00	138.015	Badan kesbangpol
				Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase konflik yang tertangani	97,00	100,00	158.116	Badan kesbangpol
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan adiwerna	100	100	30.000	Kecamatan adiwerna
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan balapulang	100	100	30.000	Kecamatan balapulang
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan bojong	100	100	30.000	Kecamatan bojong

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan bumijawa	100	100	30.000	Kecamatan bumijawa
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan dukuhwaru	75	85	30.000	Kecamatan dukuhturi
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan dukuhuturi	100	100	30.000	Kecamatan dukuhwaru
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan jatinegara	100	100	30.000	Kecamatan jatinegara
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan kedungbanteng	81	83	30.000	Kecamatan kedungabnteng
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan kramat	100	100	30.000	Kecamatan kramat
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan lebaksiu	70	80	30.000	Kecamatan lebaksiu

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan margasari	100	100	21.700	Kecamatan margasari
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan pagerbarang	100	100	30.000	Kecamatan pagerbarang
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan pangkah	100	100	30.000	Kecamatan pangkah
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan slawi	100	100	30.000	Kecamatan slawi
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan suradadi	100	100	30.000	Kecamatan suradadi
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan talang	100	100	30.000	Kecamatan talang
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan tarub	100	100	25.000	Kecamatan tarub
				Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan kecamatan warureja	82	84	30.000	Kecamatan warureja

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
			Peningkatan upaya penegakan peraturan daerah	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase gangguan trantibun yang tertangani	82,00	88,00	690.650	Satpol pp
					Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	83,00	88,00		Satpol pp
Meningkatnya kapasitas daerah dalam menurunkan resiko bencana	Indeks kapasitas daerah		Optimalisasi penanganan bencana sesuai standar	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79,00	90,00	926.247	Satpol pp
				Program penanggulangan bencana	Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	75,25	2.635.507	Bpbd
					Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1,38	1,6		Bpbd
					Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	25,77		Bpbd
				Program penanganan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100	100	313.012	Dinas sosial

Sasaran daerah	Indikator	Prioritas daerah	Fokus kebijakan	Program prioritas	Indikator outcome	Kondisi awal 2021	Target 2023	Pagu Indikatif	OPD
					pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten				
Meningkatnya pelestarian dan pewarisan kebudayaan	Persentase seni dan kesenian yang dilestarikan	Optimalisasi pelestarian budaya dan kearifan lokal	Penguatan pemahaman budaya dan kearifan lokal di lingkungan sekolah	Program pengembangan kebudayaan	Persentase tradisi yang dikembangkan	61.11	67.11	626.200	Dinas dikbud
			Pelestarian dan promosi seni dan cagar budaya	Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase seni dan kesenian yang dibina	54,55	87,88	70.700	Dinas dikbud
				Program pembinaan sejarah	Persentase sumber sejarah yang terdokumentasikan	76,47	78.43	91.800	Dinas dikbud
				Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Terlestarikannya cagar budaya	45,83	51.83	316.200	Dinas dikbud

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.4. Dukungan Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Berikut disajikan keterkaitan antara Prioritas Nasional dan Provinsi dengan Prioritas Daerah, fokus kebijakan dan kabupaten dan program pembangunan prioritas tahun 2022.

Tabel 4. 5
Dukungan Pencapaian Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Tengah Melalui Prioritas Pembangunan Daerah, Fokus Kebijakan dan Program Pembangunan Prioritas RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transfromasi pelayanan publik	Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah	Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis tik	Percepatan difusi tik pada seluruh aspek pemerintahan	Program penyelenggaraa n persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi	40,62	50,00	224.109	Dinas Kominfo
				Program pengelolaan aplikasi informatika	Persentase perangkat daerah yang terpenuhi kebutuhan tik dalam digitalisasi pemerintahan	25,00	50,00	1.800.000	Dinas Kominfo
					Persentase opd yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	16,67	70,83		Dinas Kominfo
					Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	45,00	65,00		Dinas Kominfo

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program informasi dan komunikasi public	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	20,00	30,00	1.500.000	Dinas Kominfo
			Perbaikan dan penataan sistem pelayanan prima kepada masyarakat	Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan adiwerna	76,37	78,87	45.000	Kecamatan Adiwerna
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan balapulang	79,29	81,79	45.000	Kecamatan Balapulang
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan bojong	79,62	82,12	45.000	Kecamatan Bojong
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan bumijawa	87,53	90,03	45.000	Kecamatan Bumijawa

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan dukuhwaru	79,37	81,87	45.000	Kecamatan Dukuhturi
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan dukuhturi	77,44	79,94	45.000	Kecamatan Dukuhwaru
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan jatinegara	79,70	82,20	45.000	Kecamatan Jatinegara
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan kedungbanteng	82,00	84,00	45.000	Kecamatan Kedungabnteng
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan kramat	78,98	81,48	45.000	Kecamatan Kramat
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan lebaksiu	77,25	81,25	45.000	Kecamatan Lebaksiu
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan margasari	77,40	79,90	45.000	Kecamatan Margasari

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan pagerbarang	77,63	80,13	45.000	Kecamatan Pagerbarang
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan pangkah	78,74	81,24	45.000	Kecamatan Pangkah
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan slawi	79,67	82,17	45.000	Kecamatan Slawi
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan suradadi	79,76	82,26	45.000	Kecamatan Suradadi
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan talang	73,20	75,70	45.000	Kecamatan Talang
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan tarub	80,55	83,05	45.000	Kecamatan Tarub
				Program penyelenggaraa n pemerintahan dan pelayanan public	IKM kecamatan warureja	77,40	79,90	45.000	Kecamatan Warureja

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan adiwerna	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Adiwerna
					Persentase desa maju kecamatan adiwerna	9,52	9,52		Kecamatan Adiwerna
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan balapulang	0,00	5,00	120.000	Kecamatan Balapulang
					Persentase desa maju kecamatan balapulang	5,00	9,52		Kecamatan Balapulang
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bojong	12,00	0,12	120.000	Kecamatan Bojong
					Persentase desa maju kecamatan bojong	0,29	0,29		Kecamatan Bojong
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan bumijawa	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Bumijawa
					Persentase desa maju kecamatan bumijawa	11,11	16,67		Kecamatan Bumijawa

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhwaru	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Dukuhturi
					Persentase desa maju kecamatan dukuhwaru	10,00	10,00		Kecamatan Dukuhturi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan dukuhturi	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Dukuhturi
					Persentase desa maju kecamatan dukuhturi	5,56	5,56		Kecamatan Dukuhturi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan jatinegara	0,00	6,00	120.000	Kecamatan Jatinegara
					Persentase desa maju kecamatan jatinegara	6,00	12,00		Kecamatan Jatinegara
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan kedungbanteng	0,00	0,10	120.000	Kecamatan Kedungbanteng
					Persentase desa maju kecamatan kedungbanteng	0,00	0,00		Kecamatan Kedungbanteng

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan kramat	0,00	5,26	1.391.753	Kecamatan Kramat
					Persentase desa/kelurahan maju kecamatan kramat	16,00	16,00		Kecamatan Kramat
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan lebaksiu	7,69	7,69	120.000	Kecamatan Lebaksiu
					Persentase desa maju kecamatan lebaksiu	15,00	15,00		Kecamatan Lebaksiu
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan margasari	8,00	8,00	120.000	Kecamatan Margasari
					Persentase desa maju kecamatan margasari	46,00	46,00		Kecamatan Margasari
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan pagerbarang	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Pagerbarang
					Persentase desa maju kecamatan pagerbarang	8,00	16,00		Kecamatan Pagerbarang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan pangkah	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Pangkah
					Persentase desa maju kecamatan pangkah	4,00	4,00		Kecamatan Pangkah
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan slawi	0,00	20,00	5.088.469	Kecamatan Slawi
					Persentase desa maju kecamatan slawi	60,00	60,00		Kecamatan Slawi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan suradadi	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Suradadi
					Persentase desa maju kecamatan suradadi	9,00	18,00		Kecamatan Suradadi
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan talang	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Talang
					Persentase desa maju kecamatan talang	0,00	5,26		Kecamatan Talang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa mandiri kecamatan tarub	0,00	0,00	120.000	Kecamatan Tarub
					Persentase desa maju kecamatan tarub	20,00	20,00		Kecamatan Tarub
				Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase desa/kelurahan mandiri kecamatan warureja	0,00	8,00	120.000	Kecamatan Warureja
					Persentase desa/kelurahan maju kecamatan warureja	17,00	17,00		Kecamatan Warureja
				Program administrasi pemerintahan desa	Persentase tertib dan baik administrasi pengelolaan keuangan dan asset desa	35,00	68,00	5.128.000	Dispermasdes
				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase opd yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	15,00	30,00	130.000	Disdukcapil

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pendaftaran penduduk	Persentase penduduk ber kartu keluarga	91,67	94,00	3.068.977	Disdukcapil
					Perekaman ktp elektronik	99,68	99,74		Disdukcapil
					Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki kia	21,80	60,00		Disdukcapil
				Program pencatatan sipil	Kepemilikan akta kelahiran	93,10	95,50	145.000	Disdukcapil
					Persentase penduduk ber akta kematian	68,54	70,04		Disdukcapil
			Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	1.199.500	Bappedalitbang
					Persentase hasil rekomendasi pengendalian yang ditindaklanjuti	75,00	75,00		Bappedalitbang

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	91,22	91,56	1.885.000	Bappedalitbang
					Tingkat keselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang perekonomian dan sda	92,88	93,12		Bappedalitbang
					Tingkat keselarasan dokumen perencanaan rumpun bidang infrastruktur dan kewilayahan	93,02	93,24		Bappedalitbang
				Program perekonomian dan pembangunan	Persentase opd rumpun perekonomian dan pembangunan tercapai lkjip	9,00	30,00	773.232	Sekretariat daerah

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase proses pemilihan pengadaan barang dan jasa tercapai baik	100,00	100,00		Sekretariat daerah
					Level tingkat maruritas ukpbj terpenuhi	1,00	3,00		Sekretariat daerah
			Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif	Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	65,00	72,50	1.318.771	Bappedalitbang
			Peningkatan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Program pengelolaan keuangan daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD	100,00	100,00	2.576.740	Bpkad
					Persentase ketepatan waktu penerbitan sp2d	100,00	100,00		Bpkad
					Persentase ketepatan waktu penyusunan peraturan daerah & peraturan bupati pertanggungjawaban APBD	100,00	100,00		Bpkad

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan pendapatan daerah	Rasio pad	14,09	15,06	2.524.167	Bappenda
					Rasio piutang pajak daerah	66,26	95,00		Bappenda
					Rasio pajak daerah	30,63	30,52		Bappenda
				Program pengelolaan barang milik daerah	Penyusunan laporan bmd yang baik dan tepat waktu	62,50	70,00	3.474.277	Bpkad
				Program penyelenggaraa n pengawasan	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI	91,70	92,00	764.240	Inspektorat
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat provinsi	100,00	100,00		Inspektorat
					Persentase tindak lanjut hasil pengawasan inspektorat kabupaten	39,02	60,00		Inspektorat

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan				Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase predikat wbk/wbbm berdasarkan penilaian internal	16,67	16,67	712.000	Inspektorat
					Persentase pemenuhan iku perangkat daerah	60,41	66,66		Inspektorat
					Persentase pd menyajikan laporan keuangan secara akuntabel	81,25	85,41		Inspektorat
			Penguatan kapasitas asn dan penerapan merit sistem	Program kepegawaian daerah	Persentase asn yang mendapatkan hukuman disiplin sesuai peraturan	0,12	0,12	4.000.000	BKD
					Persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya	87,97	94,77		BKD
					Persentase jabatan jabatan fungsional (non guru non kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya	35,76	41,82		BKD

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (%)	110,04	259,85		BKD
					Rasio pegawai fungsional (%)	9,87	15,28		BKD
					Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93,50	93,26		BKD
				Program pengembangan sumber daya manusia	Persentase pns yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20/jam dalam setahun	47,49	70,00	2.410.395	BKD
					Persentase pns mengikuti seminar/ workshop/sejени s sesuai dengan tupoksi jabatan	33,40	40,00		BKD
Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan	Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah serta peningkatan kualitas	Percepatan pemerataan infrastruktur wilayah	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Rasio ketersediaan jaringan irigasi dalam kondisi baik pada daerah irigasi (di) kewenangan kabupaten	58,86	61,33	6.000.000	DPU

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
	hidup dan pemantapan ketahanan bencana	lingkungan hidup		Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Cakupan akses layanan air minum	61,09	63,32	6.611.202	DPU
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase ketersediaan jaringan drainase di jalan kewenangan kabupaten	58,42	61,79	11.050.000	DPU
			Penataan ruang kota dan permukiman	Program penataan bangunan dan lingkungannya	Rasio bangunan dan lingkungan yang tertata	0,3	60	45.900.000	DPU
				Program penataan bangunan Gedung	Rasio bangunan negara yang sesuai standar teknis	76,88	79,12	43.026.555	DPU
					Rasio bangunan yang memiliki imb	6,50	8,01		DPU
				Program penyelenggaraa n jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap	81,11	84,00	84.000.000	DPU
					Proporsi jembatan dalam kondisi mantap	88,05	91,00		DPU
				Program penyelenggaraa n penataan ruang	Rasio kepatuhan terhadap itr yang diajukan	79,93	88	600.000	DPU

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penataan desa	Persentase sarana dan prasarana desa yang terpenuhi dan baik	55,23	65,23	1.970.000	Dispermasdes
				Program peningkatan kerjasama desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama	69,40	70,82	75.000	Dispermasdes
				Program pengembangan perumahan	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	2.415.075	Dinas Perkimta
					Rasio pembangunan dan pengembangan perumahan yang memiliki izin	100,00	100,00		Dinas Perkimta
				Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase penanganan perumahan tidak layak huni	13,06	17,98	8.520.000	Dinas Perkimta
				Program kawasan permukiman	Laju penurunan luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan	35,47	45,72	4.600.000	Dinas Perkimta
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	Persentase ketersediaan psu perumahan	83,31	84,50	14.300.000	Dinas Perkimta

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim			Peningkatan kualitas pencegahan dan pengelolaan limbah pencemar lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai peningkatan status mutu air sungai	3,70	7,41	2.220.812	DLH
					Presentase pengendalian lahan terkontaminasi limbah b3	1,08	9,76		DLH
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Persentase peningkatan luas lahan kehati yang terkelola	0	34,72	350.000	DLH
				Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Persentase penanganan limbah b3	60,00	62,50	275.000	DLH
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Cakupan akses sanitasi/ limbah domestik	94,37	95,57	2.749.320	DPU

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan				Program pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	47,29	52,08	10.405.000	DLH
					Persentase pengurangan sampah	14,00	17,92		DLH
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persampahan	78,00	82,00	14.166.000	DPU
		Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, koperasi dan ukm, pariwisata dan iklim investasi ramah lingkungan	Penyiapan dan pengembangan sektor perikanan kreatif ramah lingkungan	Program pengelolaan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap (kg.)	1.964.378	2.003.862	759.538	DKPP
					Nilai produksi perikanan tangkap (rp.)	13.608.184	13.881.708		DKPP
				Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Persentase perairan umum daratan (pud) yang bebas dari destructive fishing	11,11	55,56	145.144	DKPP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Produksi perikanan budidaya (kg)	2.730.262	2.764.493	2.193.469	DKPP
					Nilai produksi perikanan budidaya (rp.000)	145.642.227	148.291.680		DKPP
				Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Produksi pengolahan hasil perikanan	5.478.639	5.492.344	231.953	DKPP
					Nilai produksi pengolahan hasil perikanan (rp.000)	131.189.142	131.517.312		DKPP
			Penyiapan dan pengembangan sektor pertanian kreatif meliputi tanaman pangan hortikultura, perkebunan dan peternakan ramah lingkungan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Produksi daging (kg)	11.284.734	11.511.557	1.058.596	Dinas Tan KP
					Produksi telur (kg.)	10.760.493	10.976.779		Dinas Tan KP
					Produksi susu (kg.)	604.664	616.818		Dinas tankp
					Persentase penanganan organisme pengganggu tanaman (opt)	89,80	89,90	1.002.596	Dinas Tan KP
					Persentase alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi	63,00	65,00		Dinas Tan KP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Luas lahan pertanian organik	2,00	2,00		Dinas Tan KP
					Rasio penggunaan alsintan pra panen	62,72	62,98		Dinas Tan KP
					Rasio penggunaan alsintan pasca panen	15,51	16,98		Dinas Tan KP
				Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Indeks pertanaman	1,52	1,62	10.058.374	Dinas Tan KP
					Akseibilitas jalan usaha tani (km/ha)	2,60	3,34		Dinas Tan KP
					Luas lahan sawah lestari	100,00	100,00		Dinas Tan KP
				Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Rasio serangan organisme pengganggu tanaman (opt)	< 2,5	< 2,5	90.000	Dinas Tan KP
					Rasio penggunaan agen pengendali hayati per luas tanam dalam menekan serangan opt padi	0,00	1,5		Dinas Tan KP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase ternak terkendali status kesehatannya	31,37	5,60	288.250	Dinas Tan KP
					Persentase pengawasan peredaran produk hasil ternak yang aman sehat utruh dan halal/asuh	100	100		Dinas Tan KP
				Program penyuluhan pertanian	Persentase peningkatan kapasitas penyuluh swadaya terhadap dasar-dasar penyuluhan	0	27	379.760	Dinas Tan KP
					Penumbuhan peningkatan kelas kelompok tani pemula ke lanjut	0,00	2,51		Dinas Tan KP
			Penguatan dan diversifikasi pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	26,50	28,50	222.200	Dinas Tan KP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	48,00	50,00		Dinas Tan KP
				Program penanganan kerawanan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	72,00	90,00	37.768	Dinas Tan KP
			Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif ramah lingkungan	Program perencanaan dan pembangunan industry	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam rpip	60,00	70,00	800.000	Disperinaker
				Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (iui) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100,00	100,00	17.929	Disperinaker

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase industri yang memiliki 7 informasi industri secara lengkap dan terkini (sii nas)	20,00	60,00	34.080	Disperinaker
			Penguatan dan pengembangan destinasi wisata ramah lingkungan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi wisata produktif (dtw) yang ditetapkan	78,33	85	4.980.000	Dinas Porapar
					Persentase usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata (tdup)	69,00	79,00		Dinas Porapar
			Pengembangan sdm pariwisata kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase sdm pariwisata yang dibina	50	65	900.000	Dinas Porapar
			Penguatan fungsi pasar tradisional era tatanan baru	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Persentase pasar direhabilitasi	50,00	65,38	2.500.000	Dinas Dagkop UKM
					Persentase pasar e-ritribusi	7,69	46,15		Dinas Dagkop UKM

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase sarana dan prasaran pendistribusian yang terkelola dengan baik	100,00	100,00		Dinas Dagkop UKM
			Pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital	Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase laju peningkatan nilai penjualan produk dalam negeri	2	2,00	150.000	Dinas Dagkop UKM
				Program pengembangan ekspor	Persentase laju nilai ekspor	1	1,00	-	Dinas Dagkop UKM
				Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi bermitra	1,04	3,64	35.000	Disdagkop umkm
			Pemulihan dan pengembangan umkm	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase peningkatan umkm yang bermitra	2,63	4,21	90.000	Dinas Dagkop UKM
				Program pengembangan umkm	Persentase peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil	0,00	1,05	160.000	Dinas Dagkop UKM

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
Meningkatkan sdm berkualitas dan berdaya saing	Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sdm menuju sdm berdaya saing	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis tik	Program pengelolaan pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam paud	79,86	79,88	247.572.563	Dinas Dikbud
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,27		Dinas Dikbud
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100		Dinas Dikbud

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00		Dinas Dikbud
					Rata-rata nilai kelulusan sd	77.47	76		Dinas Dikbud
					Rata-rata nilai kelulusan smp	70.86	73.36		Dinas Dikbud
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio guru kelas paud	23,00	22,00	33.807.633	Dinas Dikbud
					Rasio guru kelas TK	3,16	4,61		Dinas Dikbud
					Rasio guru kelas SD	19:11	1.40		Dinas Dikbud
					Guru mapel PAI	3.00	2.40		Dinas Dikbud
					Guru mapel PJOK	2.90	2.40		Dinas Dikbud
					Rasio guru mapel SMP	04:38	20:19		Dinas Dikbud
					Rasio guru mapel paket A	06:14	06:14		Dinas Dikbud

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Rasio guru mapel paket B	22:44	22:44		Dinas Dikbud
					Rasio guru mapel paket C	18:14	18:14		Dinas Dikbud
			Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis tik	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Rasio daya tampung rs terhadap jumlah penduduk	0,092	0,096	5.764.435	Dinas Kesehatan
					Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	88,90	100,00		Dinas Kesehatan
					Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	98,00		Dinas Kesehatan
					Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00		Dinas Kesehatan
					Persentase bayi baru lahir mendapatkan	99,00	100,00		Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
					Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	91,00		Dinas Kesehatan
					Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	55,00		Dinas Kesehatan
					Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	30,00		Dinas Kesehatan
					Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	56,00		Dinas Kesehatan
					Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	30,00		Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Persentase penderita dm yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	79,00		Dinas Kesehatan
					Persentase odgj berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	70,00		Dinas Kesehatan
					Persentase orang terduga tbc mendapatkan pelayanan tbc sesuai standar	57,10	70,00		Dinas Kesehatan
					Persentase orang dengan risiko terinfeksi hiv mendapatkan pelayanan deteksi dini hiv sesuai standar	90,50	95,00		Dinas Kesehatan
					Cakupan balita stunting	12,50	12,30		Dinas Kesehatan
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan lainnya terakreditasi	42,00	63,00		Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD dr soeselo	100	100	26.975.560	RSUD dr soeselo
					Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD soeselo	78,46 (aa)	82 (aa)	137.990.864	RSUD dr soeselo
				Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah RSUD suradadi	100	100	5.838.651	RSUD suradadi
					Nilai kesehatan kinerja BLUD RSUD suradadi	74,06 (a)	76,16 (a)	22.075.000	RSUD suradadi
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	100,00	100,00	120.000	Dinas Kesehatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
					Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	83,00	89,60		Dinas Kesehatan
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase sarana produksi pangan industri rumah tangga yang diterbitkan sesuai ketentuan	30	36,00	820.971	Dinas Kesehatan
					Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100		Dinas Kesehatan
			Peningkatan upaya promosi dan pembudayaan hidup sehat era tatanan baru	Program pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs)	95,4	96	267.000	Dinas Kesehatan
		Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	Peningkatan pelayanan pengarusutamaan gender	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Persentase arg pada belanja operasi APBD	26,84	28,00	87.400	Dinas P3AP2KB

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				Program peningkatan kualitas keluarga	Persentase keluarga mendapat pelayanan konseling	0,04	0,06	-	Dinas P3AP2KB
				Program pemenuhan hak anak (pha)	Persentase pencapaian pemenuhan hak anak	50,00	64,00	-	Dinas P3AP2KB
			Peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda	Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,073	0,135	2.050.000	Dinas Porapar
					Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	0,067	0,071		Dinas Porapar
Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan	Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin	Program pemberdayaan sosial	Persentase psks perseorangan keluarga dan kelembagaan yang pernah dibina dan diberdayakan	32,44	66,25	438.335	Dinas Sosial

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
		ekonomi warga miskin dan rentan miskin	Perluasan perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin	Program rehabilitasi sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	29,39	62,62	2.003.750	Dinas Sosial
				Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase ppks, fakir miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.	97,99	99,21	957.011	Dinas Sosial
			Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat	Persentase pemberdayaan masyarakat desa	100,00	100,00	905.000	Dispermasdes

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
		Peningkatan kompetensi angkatan kerja dan akselerasi investasi untuk perluasan lapangan kerja		Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan dan ketahanan kesejahteraan keluarga	21,58	21,79	975.462	Dinas P3AP2KB
				Program perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	50.000	Disperinaker
			Peningkatan kompetensi dan kualifikasi angkatan kerja	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja	37.990,00	40.737,000	732.000	Disperinaker
					Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	3,70	5,50		Disperinaker
			Peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase lokasi potensial yang memiliki profil investasi	0,00	42,86	170.357	Dinas PMPTSP
				Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan calon investor yang berkomitmen	100,00	20,00	316.250	Dinas PMPTSP
				Program pelayanan	Persentase ketepatan waktu	100	100	536.311	Dinas PMPTSP

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI	PRIORITAS DAERAH	FOKUS KEBIJAKAN	PRGRAM PRIORITAS	INDIKATOR OUTCOME	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA	PAGU INDIKATIF	OPD
				penanaman modal	perizinan yang ditetapkan sebelum batas waktu				
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase kepatuhan perusahaan	61,28	67,28	330.000	Dinas PMPTSP

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.5. Pelaksanaan Program Unggulan

Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024 yang diimplementasikan dalam RKPD tahun 2022 yaitu:

Tabel 4. 6
Pelaksanaan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan RKPD
1	Pembangunan Sentra Pelayanan Publik Prima	Pembangunan Mall Pelayanan Publik
		Rehabilitasi Gedung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Penumbuhan Wirausaha Muda, Perluasan Lapangan Kerja dan Investasi Pro Rakyat	Penumbuhan Wirausaha Pemuda
		Pengembangan Kawasan Guci (Wisata <i>Hidro teraphy</i>)
3	Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang	Pemeliharaan Jalan Bebas Lubang
		Facilitasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019 (Jalan Ruas Yomani-Guci, BBI, Pasar Balamoa, SPAM dll)
		Pembangunan Jalan Sombaga – Sokatengah
		Pembangunan Jalan Sigedong- Sawangan
		Peningkatan Jalan Capar – Jatinegara
		Penyelesaian Jalingkos
4	Penangan Dampak Covid-19	Penanganan Kesehatan
		Penangananan Dampak Ekonomi
		Penanganan Dampak Sosial
5	Penataan Kota Slawi	Penataan Kota Slawi (Koridor II) berupa pembangunan jalan, drainase, dan median jalan lengkap dengan sarpras pendukung yang memiliki nilai estetika.
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Bantuan Keuangan Desa Merdeka Sampah
		Pengadaan Tanah di TPA Penujah
		Pengadaan Buldozer untuk TPA
7	Pembinaan Olahraga, Pemberdayaan Pemuda dan Pelestarian Budaya	Pengembangan Kawasan Cagar Budaya Semedo dan Pendukungnya
		Pembangunan Jalan Sigentong - Semedo

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.6. Pelaksanaan Kolaborasi Wilayah Dalam Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang

Perpres 79 tahun 2019 mempunyai peran strategis sebagai payung regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dengan regulasi ini diharapkan dapat mendukung dan memberikan nilai tambah pembangunan kawasan yang kemudian dapat mengungkit perekonomian lokal, regional, dan nasional sehingga dapat tumbuh hingga 7% pada akhir tahun 2024. Melalui Perpres 79 tahun 2019 tersebut, setidaknya terdapat 15 program/kegiatan strategis yang lokusnya berada di Kabupaten Tegal. Adapun dukungan program pembangunan Kabupaten Tegal terhadap Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Dukungan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan WP Bregasmalang

Perpres Nomor 79 Tahun 2019	Isu Strategis RPJMD 2019-2024	Program Pembangunan Prioritas	Kegiatan Strategis	Perangkat Daerah
Pengendali Banjir dan Normalisasi Sungai Jimat dan Sungai Rambut	Isu 4. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Pengembangan Sumber Air Baku SPAM Perkotaan		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kerjasama dg Perguruan Tinggi untuk Study Potensi Sumber Air Permukaan maupun Air Dalam	Diperkimtaru
Pembangunan Bendungan Jatinegara		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sertifikasi Teknis Kelayakan Teknis oleh Komite Bendungan; Apprasal/Penentuan Harga; Pembebasan lahan; Penganggaran; Lelang	DPU
Optimalisasi Waduk Cacaban			PEKERJAAN PENATAAN KAWASAN: Pekerjaan Normalisasi Bibir Waduk	DPU
			(P = 880.00 m’); Pekerjaan Pembuatan Dermaga dan Lansekap; Pekerjaan Pembuatan Pujasera; Pekerjaan Pembuatan Gardu Pandang; Pekerjaan Pembuatan Toilet dan Mushola; Pekerjaan Pembuatan Playground dan Landskip	DPU

Perpres Nomor 79 Tahun 2019	Isu Strategis RPJMD 2019-2024	Program Pembangunan Prioritas	Kegiatan Strategis	Perangkat Daerah
Pengendalian Banjir Sistem Sungai Cacaban		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DED (2017) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Pembangunan Sarpras Konservasi SDA Sungai Pemali (Tegal dan Brebes)			DED (2016) oleh Pemda Tegal; Review DED (2022); Dok Lingkungan (2023); LARAP (2023); Konstruksi (2024)	DPU
Peningkatan Jalan Akses Kaligua - Guci		Program Penyelenggaraan Jalan	Koordinasi lintas sektor	DPU
Peningkatan Jalan Yomani - Guci			DED (2020); Koordinasi Anggaran (2021); Konstruksi (2022)	DPU
Peningkatan Jalan dan Perlengkapan Jalan Ketanggungan - Prupuk			Pelebaran Jalan menjadi 12 meter; Pemasangan Guardriil pada Tepi Saluran Irigasi; Penertiban Bangunan Liar yang berada pada Tanah PSDA	DPU
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah		Program Pengembangan Perumahan	Verifikasi, validasi, rekomendasi, pembangunan	Disperkimtaru
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Verifikasi, validasi, rekomendasi, pembangunan	Disperkimtaru
Fasilitasi Pengembangan Industri Klaster Logam	Isu 3. Pemulihan Ekonomi Lokal, Pariwisata, Industri Kreatif, dan Ketahanan Pangan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Revitalisasi Penataan Kawasan; Peremajaan Bangunan; Pengembangan Fasilitas	Disperinaker
Revitalisasi Pasar Adiwerna, Balamoa, Guci, Bumijawa		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembahasan dg Kemendag Bln Februari 2020; Peninjauan Lap oleh Kemendag Bln Februari 2020; Telah mengirimkan Semua Dokumen 2020; Koordinasi dg PPMU Prop Jateng	Disdakop UKM

Perpres Nomor 79 Tahun 2019	Isu Strategis RPJMD 2019-2024	Program Pembangunan Prioritas	Kegiatan Strategis	Perangkat Daerah
Pembangunan Pasar Ikan dan Balai Benih Ikan (BBI)		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	FS (2021); DED (2021); LARAP (2021); Dok Lingkungan (2022); Pembebasan Lahan (2022); Konstruksi (2023)	DKPP
Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Koordinasi lintas sektor	DKPP
Pengembangan Pertanian Bawang Putih		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	FS (2022); DED (2022) Dok Lingkungan (2022); Konstruksi (2023)	Dis Tan dan KP

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.7. Integrasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) dalam RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2023

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) kedalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat tujuan dan sasaran Global. Sebagai bentuk komitmen Kabupaten Tegal menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan komitmen internasional dan nasional tersebut, maka bentuk integrasinya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 8
Integrasi Program Pembangunan Daerah untuk Pencapaian TPB/SDG's

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
1	Tujuan 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perseorangan Keluarga Dan Kelembagaan Yang Pernah Dibina Dan Diberdayakan	32,44	83,15	DINAS SOSIAL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis Dan PPKS Lainnya Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti .	29,39	81,15	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial.	97,99	100,00	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa	100,00	100,00	DISPERMASDES
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Keluarga Yang Mendapatkan Pembinaan Dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga	21,58	21,89	DINAS P3AP2KB
2	Tujuan 2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap (Kg.)	1.964.378	2.023.900	DKPP
			Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.)	13.608.184	14.020.525	DKPP
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (Kg)	2.730.262	2.792.138	DKPP
			Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp.000)	145.642.227	150.431.397	DKPP
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	5.478.639	5.503.329	DKPP
			Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (Rp.000)	131.189.142	131.780.347	DKPP

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produksi Daging (Kg)	11.284.734	11.626.673	DINAS TAN KP
			Produksi Telur (Kg.)	10.760.493	11.086.547	DINAS TAN KP
			Produksi Susu (Kg.)	604.664	622.986	DINAS TANKP
			Persentase Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	89,80	89,93	DINAS TAN KP
			Persentase Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi	63,00	67,00	DINAS TAN KP
			Luas Lahan Pertanian Organik	2,00	2,00	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Alsintan Pra Panen	62,72	63,24	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Alsintan Pasca Panen	15,51	19,45	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Indeks Pertanaman	1,52	1,66	DINAS TAN KP
			Akseibilitas Jalan Usaha Tani (Km/Ha)	2,60	3,70	DINAS TAN KP
			Luas Lahan Sawah Lestari	100,00	100,00	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rasio Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	< 2,5	< 2,5	DINAS TAN KP
			Rasio Penggunaan Agen Pengendali Hayati Per Luas Tanam Dalam Menekan Serangan OPT Padi	0,00	2,00	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Ternak Terkendali Status Kesehatannya	31,37	5,60	DINAS TAN KP
			Persentase Pengawasan Peredaran Produk Hasil Ternak Yang Aman Sehat Utruh Dan Halal/ASUH	100	100	DINAS TAN KP

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kapasitas Penyuluh Swadaya Terhadap Dasar-Dasar Penyuluhan	0	20	DINAS TAN KP
			Penumbuhan Peningkatan Kelas Kelompok Tani Pemula Ke Lanjut	0,00	2,57	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	72,00	90,00	DINAS TAN KP
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan Dan Pembinaan Keamanan Pangan	90	83	DINAS TANKP
3	Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat Dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	0,092	0,098	DINAS KESEHATAN
			Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	88,90	100,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	93,30	99,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	98,20	100,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	73,70	92,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	38,90	60,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	15,40	35,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan	33,60	57,00	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
			Skrining Kesehatan Sesuai Standar			
			Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10,10	35,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	74,50	80,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	57,30	75,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	57,10	75,00	DINAS KESEHATAN
			Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	90,50	98,00	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Balita Stunting	12,50	12,20	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Dr Soeselo	100	100	RSUD Dr SOESELO
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Soeselo	78,46 (AA)	86 (AA)	RSUD Dr SOESELO
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Perangkat Daerah RSUD Suradadi	100	100	RSUD SURADADI
			Nilai Kesehatan Kinerja BLUD RSUD Suradadi	74,06 (A)	77,26 (A)	RSUD SURADADI
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Cakupan Pelayanan Perijinan Praktik Tenaga Kesehatan	100,00	100,00	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Puskesmas Yang Mempunyai 9 Tenaga Kesehatan Strategis	83,00	93,10	DINAS KESEHATAN

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Diterbitkan Sesuai Ketentuan	30	39,00	DINAS KESEHATAN
			Cakupan Pemenuhan Persyaratan Perijinan Sarana Pelayanan Kefarmasian	100	100	DINAS KESEHATAN
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS)	95,4	96	DINAS KESEHATAN
4	Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Untuk Semua	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD	79,86	79,89	DINAS DIKBUD
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan.	97,25	97,28	DINAS DIKBUD
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasai Dalam Pendidikan Dasar	107,03	100	DINAS DIKBUD
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun Yang Berpartisipasai Dalam Pendidikan Menengah	105,99	100,00	DINAS DIKBUD
			Rata-Rata Nilai Kelulusan SD	77.47	77	DINAS DIKBUD
			Rata-Rata Nilai Kelulusan SMP	70.86	74.5	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Muatan Lokal Dalam KBM	5,00	5,00	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Kelas PAUD	23,00	15,00	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Kelas TK	3,16	5,82	DINAS DIKBUD

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
			Rasio Guru Kelas SD	19:11	1.30	DINAS DIKBUD
			Guru Mapel PAI	3.00	1.90	DINAS DIKBUD
			Guru Mapel PJOK	2.90	1.90	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel SMP	04:38	00:11	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket A	06:14	06:14	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket B	22:44	22:44	DINAS DIKBUD
			Rasio Guru Mapel Paket C	18:14	18:11	DINAS DIKBUD
		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	100	100	DINAS DIKBUD
5	Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender Dan Memberdayakan Kaum Perempuan	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG Pada Belanja Operasi APBD	26,84	29,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Keluarga Mendapat Pelayanan Konseling	0,04	0,07	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Tersedia	20,00	50,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Pencapaian Pemenuhan Hak Anak	50,00	67,00	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate) CPR	67,8	69,34	DINAS P3AP2KB
			Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmeet Need)	15,27	14,67	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,28	2,22	DINAS P3AP2KB
6	Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan Serta	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio Ketersediaan Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Pada Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten	58,86	62,57	DPU

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
	Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	65,55	DPU
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Ketersediaan Jaringan Drainase Di Jalan Kewenangan Kabupaten	58,42	62,15	DPU
7	Tujuan 7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, Dan Modern Untuk Semua					
8.	Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yang Produktif Dan Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yang Layak Untuk Semua	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Destinasi Tujuan Wisata Produktif (DTW) Yang Ditetapkan	78,33	90	DISPORAPAR
			Persentase Usaha Pariwisata Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	69,00	84,00	DISPORAPAR
						Porapar
		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase DTW Yang Dipromosikan	78,33	90,00	DISPORAPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata Yang Dibina	50	80	DISPORAPAR
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Direhabilitasi	50,00	76,92	DINAS DAGKOP UKM
			Persentase Pasar E-Ritribusi	7,69	65,38	DINAS DAGKOP UKM
			Persentase Sarana Dan Prasaran Pendistribusian Yang Terkelola Dengan Baik	100,00	100,00	DINAS DAGKOP UKM

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Laju Peningkatan Nilai Penjualan Produk Dalam Negeri	2	2,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Laju Nilai Ekspor	1	1,00	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Bermitra	1,04	4,94	Disdagkop UMKM
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM Yang Bermitra	2,63	4,73	DINAS DAGKOP UKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan Skala Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil	Persen; Kumulatif; IKU OPD	160000,00	631600
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	0,073	0,161	DINAS PORAPAR
			Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Social Kemasyarakatan	0,067	0,073	DINAS PORAPAR
		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	100	100	DISPERINAKER
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	37.990,000	42.410,000	DISPERINAKER
			Persentase Tenaga Kerja Yang Bersertifikat Kompetensi	3,70	6,40	DISPERINAKER
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah	17,82	35,00	DISPERINAKER
		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Lokasi Potensial Yang Memiliki Profil Investasi	0,00	57,14	DINAS PMPTSP
		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Calon Investor Yang Berkomitmen	100,00	20,00	DINAS PMPTSP
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Perizinan Yang Ditetapkan Sebelum Batas Waktu	100	100,00	DINAS PMPTSP

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Perusahaan	61,28	70,28	DINAS PMPTSP
9	Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Yang Tangguh, Meningkatkan Industri Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan Yang Termanfaatkan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	65,00	73,44	BAPPEDALITBANG
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Rasio Bangunan Dan Lingkungan Yang Tertata	0,3	91,11	DPU
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Bangunan Negara Yang Sesuai Standar Teknis	76,88	80,24	DPU
			Rasio Bangunan Yang Memiliki IMB	6,50	8,57	DPU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	81,11	85,50	DPU
			Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Mantap	88,05	92,00	DPU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Rasio Kepatuhan Terhadap ITR Yang Diajukan	79,93	89	DPU
		PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Sarana Dan Prasarana Desa Yang Terpenuhi Dan Baik	55,23	70,23	DISPERMASDES
		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RPIP	60,00	80,00	DISPERINAKER
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	100,00	100,00	DISPERINAKER
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri Yang Memiliki 7 Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini (SII Nas)	20,00	80,00	DISPERINAKER
10.		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Adiwerna	0,00	4,76	KECAMATAN ADIWERNA

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
	Tujuan 10. Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antarnegara		Persentase Desa Maju Kecamatan Adiwerna	9,52	14,29	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Balapulang	0,00	9,52	KECAMATAN BALAPULANG
			Persentase Desa Maju Kecamatan Balapulang	5,00	9,52	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bojong	12,00	0,18	KECAMATAN BOJONG
			Persentase Desa Maju Kecamatan Bojong	0,29	0,35	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Bumijawa	0,00	5,56	KECAMATAN BUMIJAWA
			Persentase Desa Maju Kecamatan Bumijawa	11,11	22,22	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Dukuhturi	0,00	10,00	KECAMATAN DUKUHTURI
			Persentase Desa Maju Kecamatan Dukuhturi	10,00	10,00	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Dukuhturi	0,00	5,56	KECAMATAN DUKUHTURI
			Persentase Desa Maju Kecamatan Dukuhturi	5,56	11,11	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Jatinegara	0,00	6,00	KECAMATAN JATINEGARA
			Persentase Desa Maju Kecamatan Jatinegara	6,00	12,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,10	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
			Persentase Desa Maju Kecamatan Kedungbanteng	0,00	0,10	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri Kecamatan Kramat	0,00	5,26	KECAMATAN KRAMAT
			Persentase Desa/Kelurahan Maju Kecamatan Kramat	16,00	26,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Lebaksiu	7,69	7,69	KECAMATAN LEBAKSIU

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
			Persentase Desa Maju Kecamatan Lebaksiu	15,00	23,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Margasari	8,00	15,00	KECAMATAN MARGASARI
			Persentase Desa Maju Kecamatan Margasari	46,00	54,00	KECAMATAN MARGASARI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Pagerbarang	0,00	8,00	KECAMATAN PAGERBARANG
			Persentase Desa Maju Kecamatan Pagerbarang	8,00	24,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Pangkah	0,00	4,00	KECAMATAN PANGKAH
			Persentase Desa Maju Kecamatan Pangkah	4,00	9,00	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Slawi	0,00	20,00	KECAMATAN SLAWI
			Persentase Desa Maju Kecamatan Slawi	60,00	80,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Suradadi	0,00	9,00	KECAMATAN SURADADI
			Persentase Desa Maju Kecamatan Suradadi	9,00	18,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Talang	0,00	0,00	KECAMATAN TALANG
			Persentase Desa Maju Kecamatan Talang	0,00	5,26	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa Mandiri Kecamatan Tarub	0,00	5,00	KECAMATAN TARUB
			Persentase Desa Maju Kecamatan Tarub	20,00	25,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan Mandiri Kecamatan Warureja	0,00	8,00	KECAMATAN WARUREJA
			Persentase Desa/Kelurahan Maju Kecamatan Warureja	17,00	25,00	KECAMATAN WARUREJA

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
11	Tujuan 11. Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh Dan Berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten	100	100	DINAS PERKIMTAH
			Rasio Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan Yang Memiliki Izin	100,00	100,00	DINAS PERKIMTAH
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Penanganan Perumahan Tidak Layak Huni	13,06	20,79	DINAS PERKIMTAH
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Laju Penurunan Luas Kawasan Kumuh Yang Telah Ditetapkan	35,47	50,48	DINAS PERKIMTAH
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Ketersediaan PSU Perumahan	83,31	85,10	DINAS PERKIMTAH
12	Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi Dan Konsumsi Berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Penguatan Cadangan Pangan	26,50	30,00	DINAS TAN KP
			Persentase Ketersediaan Informasi Harga Dan Pasokan Pangan	48,00	51,00	DINAS TAN KP
13.	Tujuan 13. Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Dan Dampaknya	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Nilai Peningkatan Status Mutu Air Sungai	3,70	11,11	DLH
			Persentase Pengendalian Lahan Terkontaminasi Limbah B3	1,08	16,84	DLH
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penanganan Limbah B3	60,00	65,00	DLH
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,97	DPU
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	47,29	54,18	DLH
			Persentase Pengurangan Sampah	14,00	23,15	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Rasio Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	78,00	83,00	DPU

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
14	Tujuan 14. Melestarikan Dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan Dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Bebas Dari Destructive Fishing	11,11	77,78	DKPP
15	Tujuan 15. Melindungi, Merestorasi, Dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, Serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Luas Lahan Kehati Yang Terkelola	0	37,50	DLH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pelaku Usaha Yang Berkomitmen Dalam Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup	30,00	50,00	DLH
16	Tujuan 16. Memperkuat Masyarakat Yang Inklusif Dan Damai Untuk	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Yang Terpenuhi Kebutuhan TIK Dalam Digitalisasi Pemerintahan	25,00	75,00	DINAS KOMINFO
			Persentase OPD Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Dinas Kominfo	16,67	85,42	DINAS KOMINFO

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
	Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan Untuk Semua, Dan Membangun Kelembagaan Yang Efektif, Akuntabel, Dan Inklusif Di Semua Tingkatan		Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	45,00	75,00	DINAS KOMINFO
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	20,00	50,00	DINAS KOMINFO
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Adiwerna	76,37	79,87	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Balapulang	79,29	82,79	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bojong	79,62	83,12	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Bumijawa	87,53	91,03	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	79,37	82,87	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Dukuhturi	77,44	80,94	KECAMATAN DUKUHWARU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Jatinegara	79,70	83,20	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kedungbanteng	82,00	85,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Kramat	78,98	82,48	KECAMATAN KRAMAT

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Lebaksiu	77,25	82,25	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Margasari	77,40	80,90	KECAMATAN MARGASARI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pagerbarang	77,63	81,13	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Pangkah	78,74	82,24	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Slawi	79,67	83,17	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Suradadi	79,76	83,26	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Talang	73,20	76,70	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Tarub	80,55	84,05	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM Kecamatan Warureja	77,40	80,90	KECAMATAN WARUREJA
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	15,00	40,00	DISDUKCAPIL
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Penduduk Ber Kartu Keluarga	91,67	96,00	DISDUKCAPIL
			Perekaman KTP Elektronik	99,68	99,76	DISDUKCAPIL
			Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki KIA	21,80	70,00	DISDUKCAPIL

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kepemilikan Akta Kelahiran	93,10	96,00	DISDUKCAPIL
			Persentase Penduduk Ber Akta Kematian	68,54	70,79	DISDUKCAPIL
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Disusun Sesuai Tahapan	100,00	100,00	BAPPEDALITBANG
			Persentase Hasil Rekomendasi Pengendalian Yang Ditindaklanjuti	75,00	80,00	BAPPEDALITBANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Adiwerna	50,00	89,00	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Balapulang	35,00	90,00	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Bojong	35,00	89,00	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Bumijawa	35,00	84,00	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhturi	35,00	60,00	KECAMATAN DUKUHTURI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Dukuhturi	50,00	89,00	KECAMATAN DUKUHWARU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Jatinegara	35,00	89,00	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Kedungbanteng	35,00	89,00	KECAMATAN KEDUNGBANTENG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Kramat	30,00	89,00	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Lebaksiu	35,00	89,00	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Margasari	50,00	100,00	KECAMATAN MARGASARI

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Pagerbarang	35,00	89,00	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Pangkah	35,00	89,00	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Slawi	35,00	89,00	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Suradadi	35,00	89,00	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Talang	35,00	89,00	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Tarub	35,00	89,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Yang Tertib Administrasi Kecamatan Warureja	35,00	89,00	KECAMATAN WARUREJA
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan APBD	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan SP2D	100,00	100,00	BPKAD
			Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Peraturan Daerah & Peraturan Bupati Pertanggungjawaban APBD	100,00	100,00	BPKAD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD	14,09	15,15	BAPPENDA
			Rasio Piutang Pajak Daerah	66,26	98,90	BAPPENDA
		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyusunan Laporan BMD Yang Baik Dan Tepat Waktu	62,50	75,00	BPKAD
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI	91,70	92,00	INSPEKTORAT
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	100,00	100,00	INSPEKTORAT
			Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten	39,02	70,00	INSPEKTORAT

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Predikat WBK/WBBM Berdasarkan Penilaian Internal	16,67	16,67	INSPEKTORAT
			Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah	60,41	70,83	INSPEKTORAT
			Persentase PD Menyajikan Laporan Keuangan Secara Akuntabel	81,25	89,58	INSPEKTORAT
		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN Yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan	0,12	0,11	BKD
			Persentase Jabatan Struktural Terisi Sesuai Dengan Kompetensinya	87,97	95,42	BKD
			Persentase Jabatan Jabatan Fungsional (Non Guru Non Kesehatan) Terisi Sesuai Dengan Kompetensinya	35,76	44,85	BKD
			Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menengah Dasar (%)	110,04	288,10	BKD
			Rasio Pegawai Fungsional (%)	9,87	15,68	BKD
			Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan	93,50	92,69	BKD
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase PNS Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan 20/Jam Dalam Setahun	47,49	75,01	BKD
			Persentase PNS Mengikuti Seminar/ Workshop/Sejenis Sesuai Dengan Tupoksi Jabatan	33,40103814	45,00563698	BKD
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	6,79	8,49	DINAS P3AP2KB
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	0,01	0.0130	DINAS P3AP2KB

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Presentase Masyarakat Yang Memahami Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	80,42	88,66	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Gangguan KANTIBMAS Yang Tertangani	85	100	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Konflik Yang Tertangani	97	100	BADAN KESBANGPOL
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Adiwerna	100	100	KECAMATAN ADIWERNA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Balapulang	100	100	KECAMATAN BALAPULANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Bojong	100	100	KECAMATAN BOJONG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Bumijawa	100	100	KECAMATAN BUMIJAWA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Dukuhwaru	75	85	KECAMATAN DUKUHUTURI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Dukuhuturi	100	100	KECAMATAN DUKUHWARU
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Jatinegara	100	100	KECAMATAN JATINEGARA
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Kedungbanteng	81	83	KECAMATAN KEDUNGBANTENG

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Kramat	100	100	KECAMATAN KRAMAT
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Lebaksiu	70	80	KECAMATAN LEBAKSIU
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Margasari	100	100	KECAMATAN MARGASARI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Pagerbarang	100	100	KECAMATAN PAGERBARANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Pangkah	100	100	KECAMATAN PANGKAH
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Slawi	100	100	KECAMATAN SLAWI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Suradadi	100	100	KECAMATAN SURADADI
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Talang	100	100	KECAMATAN TALANG
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Tarub	100,00	100,00	KECAMATAN TARUB
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Kecamatan Warureja	82,00	84,00	KECAMATAN WARUREJA
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase Gangguan Trantibun Yang Tertangani	82,00	88,00	SATPOL PP
			Presentase Pelanggaran Perda Dan Perkada Yg Diselesaikan	83	88	SATPOL PP

No	Tujuan TPB/SDG's	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Kinerja 2020	Target 2023	PD
		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	79	90	SATPOL PP
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Jumlah Warga Negara Di Kawasan Rawan Bencana Yang Mempeloleh Informasi Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman Bencana	65	75,25	BPBD
			Persentase Jumlah Warga Negara Yg Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiap Siagaan Terhadap Bencana	1,38	1,6	BPBD
			Persentase Jumlah Warga Negara Yg Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	22,26	25,77	BPBD
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	100,00	100,00	DINAS SOSIAL
17	Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan Dan Merefektivisasi Kemitraan Global Untuk Pembangunan Berkelanjutan					

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.8. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Isu-isu pembangunan yang berorientasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah diintervensi melalui prioritas pembangunan daerah dan prioritas program daerah. Berikut disajikan dukungan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui program pembangunan prioritas daerah dan prioritas program daerah sebagaimana table berikut:

Tabel 4. 9
Keterkaitan antara Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan Program Pembangunan Prioritas Daerah

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
1	Bidang Urusan Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	11	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	79,86	79,89	249.998.289	DINAS DIKBUD
		Pendidikan Dasar	12a	Jumlah warga Negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar jenjang SD/MI		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	107,03	100	DINAS DIKBUD	
			12b	Jumlah warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jenjang SMP/MTs		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	105,99	100,00	DINAS DIKBUD	

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
		Pendidikan Kesetaraan	13	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	97,25	97,28		DINAS DIKBUD
2	Bidang Urusan Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	21	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93,30	99,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan ibu bersalin	22	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	98,20	100,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	23	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99,00	100,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan balita	24	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	73,70	92,00		DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	25	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	38,90	60,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	26	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	15,40	35,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	27	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	33,60	57,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	28	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10,10	35,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	29	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	74,50	80,00		DINAS KESEHATAN

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	210	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	57,30	75,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	211	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	57,10	75,00		DINAS KESEHATAN
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	212	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan layanan kesehatan		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	90,50	98,00		DINAS KESEHATAN
3	Bidang Urusan Pekerjaan Umum	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	31	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Cakupan Akses Layanan Air Minum	61,09	65,55	6.677.314	DPU
		Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	32	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Cakupan Akses Sanitasi/ Limbah Domestik	94,37	95,97	2.776.813	DPU

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
4	Bidang Urusan Perumahan Rakyat	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	41	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	100	2.439.226	DINAS PERKIMTAH
		Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	42	Jumlah Warga Negara yang terkena rekolasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni						
5	Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	51	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase pelanggaran perda dan perkara yg diselesaikan	83,00	88,00		SATPOL PP

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
		Pelayanan informasi rawan bencana	52	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	79	90	926.247	SATPOL PP
		Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	53	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		Persentase jumlah warga negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	65	75,25	2.635.507	BPBD
		Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	54	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiap siagaan terhadap bencana	1,38	1,6		BPBD

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
		Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	55	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase jumlah warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	22,26	25,77		BPBD
6	Bidang Urusan Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti	56	Jumlah warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis dan PPKS lainnya yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti .	29,39	81,15	2.023.788	DINAS SOSIAL
		Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	57	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						
		Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	58	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti						

No	Bidang SPM	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Pencapaian	Program Pembangunan Prioritas	Indikator	Kondisi Awal 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		PD Penanggung Jawab
								2023		
								Target	Rp. (000)	
		Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	59	Jumlah warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti						
		Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	510	Jumlah warga negara korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS, Fakir Miskin dan anak terlantar yang memperoleh perlindungan dan jaminan Sosial.	97,99	100,00	966.581	DINAS SOSIAL

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.9. Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Kebijakan Spasial

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 memperhitungkan kebijakan pembangunan berbasis spasial. Berikut disajikan gambaran desain pelaksanaan kebijakan pembangunan spasial untuk sektor Pengembangan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah serta sektor Peningkatan Kesejahteraan Sosial.

a) Pembangunan Kawasan Perdesaan

Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu dilakukan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten melalui Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten/kota yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Desa-desa yang berbatasan ini dapat terdiri atas desa dalam kecamatan yang berbeda.

Kajian eksploratif memunculkan delineasi pengelompokan desa dengan tema tertentu sesuai dengan kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Jumlah desa dalam suatu tema Kawasan Perdesaan disusun dengan mempertimbangkan dampak positif yang signifikan dalam mendukung pemajuan desa dan kabupaten.

Pendekatan (ancangan) pemajuan desa melalui pengelompokan desa secara tematik ini tidak dilakukan hanya untuk suatu kelompok desa tertentu, melainkan digunakan untuk membangun seluruh desa, tidak ada satu desapun yang terlepas dari pengelompokan secara tematik tersebut.

Dalam memajukan desa dengan pendekatan kawasan ini, keterkaitan antara pengembangan kelompok desa dan kelurahan merupakan pertimbangan penting, sesuai dengan amanat undang-undang Penataan Ruang. Dengan demikian sejumlah 281 desa dan 6 kelurahan di Kabupaten Tegal merupakan suatu kesatuan yang maju secara terpadu dan berkelanjutan.

Pengelompokan desa dalam Kawasan Perdesaan dilakukan dalam kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. Artinya, tema dikemas dalam bentuk yang cukup unik dan tajam agar memiliki daya ungkit yang tinggi. Berikut ini pengelompokan desa dibagi menjadi 6 kawasan.

Kawasan I, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Suradadi, Kramat dan Warureja, diberi tema yang mengangkat keserasian hamparan kebun melati dan industri di sepanjang pesisir utara kabupaten Tegal. Dengan profil seperti itu kawasan perdesaan ini diberi nama “Industri di Lautan Melati”.

Kawasan II, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Talang, Pangkah, Adiwerna, Dukuhturi dan Tarub, mengangkat tema keserasian antara kegiatan persawahan padi dengan sentra industri kecil di sekitarnya yang berpotensi mengeluarkan limbah. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Langkah Adituri” yang diambil dari singkatan kata Talang, Pangkah, Adiwerna, Tarub dan Dukuhturi.

Kawasan III, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Jatinegara, Kedungbanteng dan Pangkah, merupakan perpaduan antara infrastruktur pertanian berupa waduk dengan segenap sistem pemasokan air, digabung dengan pelestarian warisan bumi yang berpotensi sebagai eduwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Warisan Bumi Lestari”.

Kawasan IV, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Lebaksiu, Dukuhwaru, Slawi dan Pangkah, memiliki keunikan tersendiri. Di kawasan ini terdapat pusat pemerintahan kabupaten Tegal. Taman Teknologi Pertanian juga berlokasi di kawasan ini. Dengan demikian kawasan ini merupakan pendorong inovasi kawasan perdesaan. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Handayani Inovasi”.

Kawasan V, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Margasari, Balapulang dan Pagerbarang, merupakan sentra budidaya yang cukup lengkap meliputi tanaman pangan, peternakan termasuk sentra penanaman pohon sebagai bahan baku bangunan. Industri sandang juga mulai dimulai di sini, sehingga tema kawasan perdesaannya adalah perpaduan antara kegiatan-kegiatan tadi. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Sapa Papa”, yang merupakan singkatan dari kata Sandang, Pangan, Papan dan Pakan.

Kawasan VI, yang terdiri dari desa-desa di kecamatan Balapulang, Bumijawa dan Bojong, memiliki ciri pertanian yang khusus. Budidaya tanaman obat berpusat di sini, bahkan dilengkapi dengan klinik jamu. Selain budidaya tanaman berkhasiat obat, di kawasan ini juga terdapat potensi pemanfaatan air untuk kegiatan terapi. Dengan ciri-ciri tersebut, ditambah dengan lingkungan alam yang menarik, kawasan ini bertemakan kesehatan alami dan pariwisata. Dengan profil seperti itu, kawasan perdesaan ini diberi nama “Sehat Alami”.

Untuk membuat gerakan pembangunan Kawasan Perdesaan ini menjadi efisien, masing-masing Kawasan Perdesaan Tematik kemudian dibagi menjadi beberapa sub-kawasan untuk kepentingan kemudahan pengelolaan.

Karena sebagian besar wilayah kabupaten Tegal merupakan kawasan perdesaan, ditambah dengan pusat pemerintahan kabupaten berada di kawasan perdesaan, maka Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat dijadikan “cross cutting issues” yang sangat strategis.

Karena kawasan perdesaan mencakup seluruh desa di kabupaten Tegal, program-program penting pembangunan kabupaten Tegal perlu digerakkan melalui Kawasan Perdesaan Tematik.

Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Tematik, program penting pembangunan kabupaten dijadikan program generik, sehingga seluruh kawasan perdesaan wajib melaksanakannya, sedangkan program yang sesuai dengan tema kawasan perdesaan dilaksanakan sebagai program spesifik.

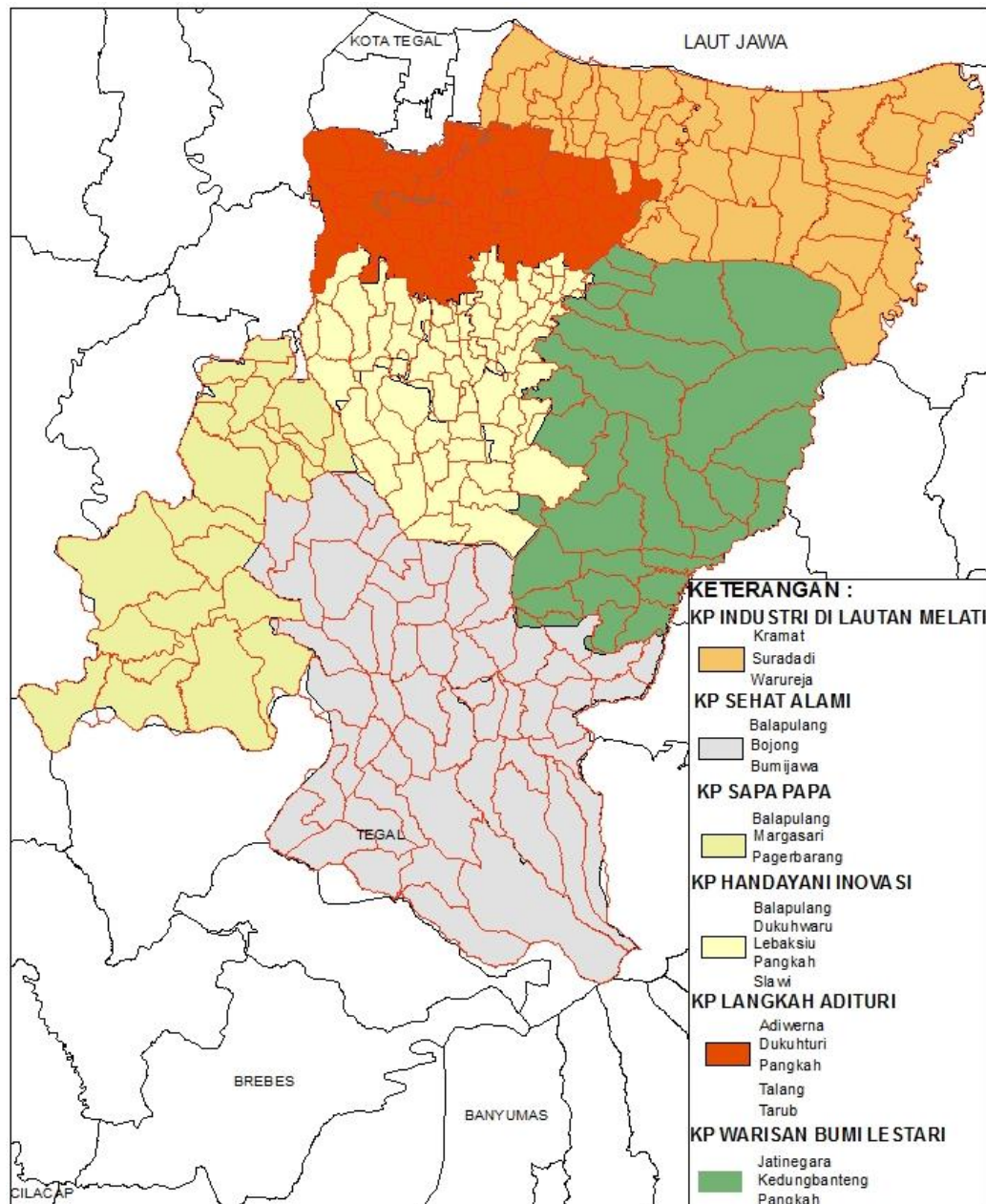
Program penting yang dapat dilaksanakan sebagai program generik adalah sebagai berikut:

Sistem pengelolaan sampah, Kegiatan ramah lingkungan, Penumbuhan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT), Peningkatan akses telekomunikasi, Jalan lingkar kawasan, Transportasi lingkar kawasan, termasuk penataan transportasi tertentu, Ruang publik terbuka, Pusat belajar masyarakat, termasuk balai pertemuan warga, fasilitas kesehatan masyarakat, Pengukuran daya dukung lingkungan, Peningkatan skor SDG, termasuk penanganan stunting, dan Pelaksanaan Permendes tentang prioritas pembangunan desa.

Program spesifik Kawasan Perdesaan Tematik disusun sesuai dengan tema kawasan dan disepakati oleh desa-desa anggota kawasan.

Pembangunan kawasan perkotaan yang juga merupakan program pembangunan kabupaten diserasikan dengan pembangunan tata ruang dan pendukung pembangunan secara komplementer.

Gambar 4.1
Delineasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kabupaten Tegal



Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

b) Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah

Pendekatan spasial dalam pengembangan infrastruktur dan pembangunan wilayah ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas atau keterhubungan antar wilayah di Kabupaten Tegal sehingga diperlukan untuk membuka ruang-ruang baru untuk menyatukan suatu wilayah. Ketimpangan pembangunan antar wilayah tidak akan lagi tercipta karena pembangunan tidak berfokus di wilayah tertentu dan tanpa diskriminasi.

pada daerah yang dianggap terbelakang. Dalam pendekatan ini yang menjadi dasar adalah beberapa kawasan strategis yang ada. Kawasan strategis di Kabupaten Tegal adalah: Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). Untuk KSP terdiri dari:

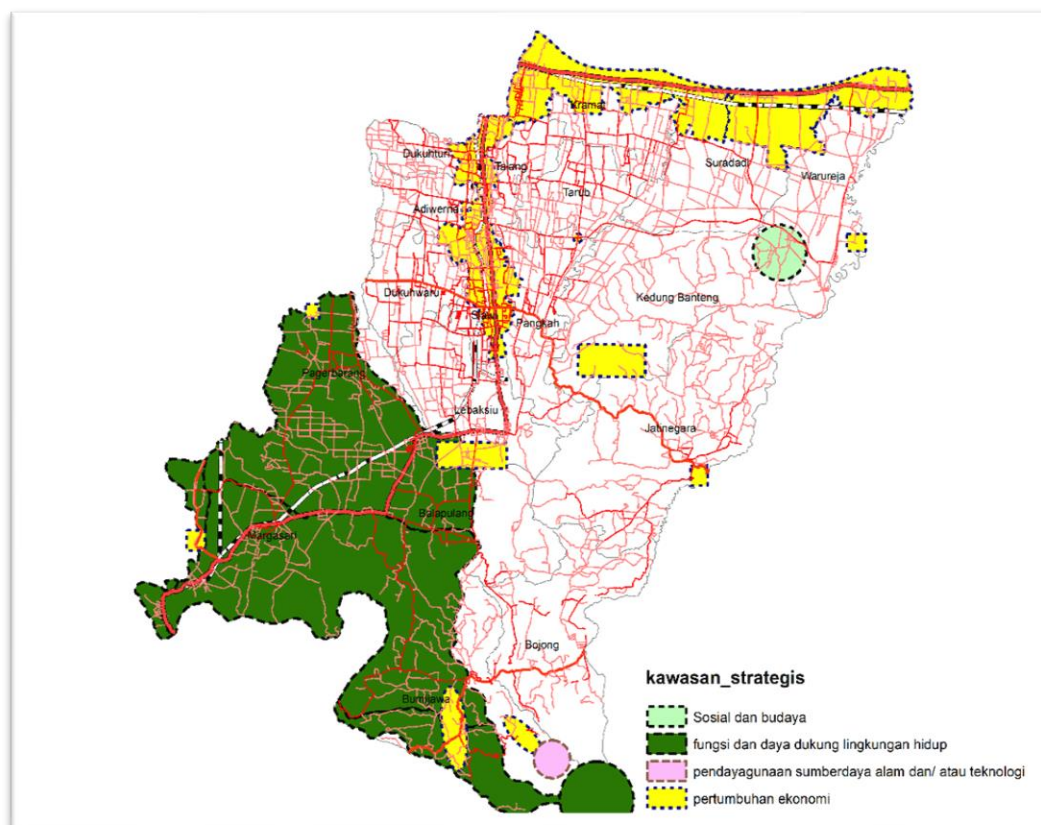
- a. Kawasan Perkotaan Bregasmalang (Brebis, Kota, Tegal, Slawi, dan Pemalang) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Panas Bumi Guci dan Baturaden dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/ atau teknologi tinggi;
- c. Daerah Aliran Sungai kritis lintas Kabupaten/ Kota terletak di DAS Pemali dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- d. Kawasan Gunung Slamet dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sedangkan untuk KSK di Kabupaten Tegal terdiri dari kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut kepentingan Sosial dan budaya, dimana:

1. KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi:
 - a. kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna meliputi: Kecamatan Slawi; dan Kecamatan Adiwerna.
 - b. kawasan Industri Pantura dan Margasari meliputi Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja; Kecamatan Margasari
 - c. Kawasan Agropolitan meliputi: Kecamatan Bojong; dan Kecamatan Bumijawa;
 - d. Kawasan Minapolitan terdiri atas: Perikanan tangkap Waduk Cacaban dan Perikanan budidaya di Kecamatan Lebaksiu dan Balapulang
 - e. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Brebis terletak di Kecamatan Pagerbarang dan Margasari;
 - f. Wilayah perbatasan dengan Kabupaten Pemalang terletak di Kecamatan Warureja dan Jatinegara; dan
 - g. Wilayah perbatasan dengan Kota Tegal terletak di Kecamatan Kramat, Kecamatan Talang dan Kecamatan Dukuhturi.
 - h. Kawasan Perdagangan dan Jasa Mejasem Raya di Kecamatan Kramat;
 - i. Kawasan Perdagangan dan Jasa Balamoa di Kecamatan Pangkah dan Kecamatan Tarub.
2. KSK dari sudut kepentingan Sosial dan budaya berupa: kawasan Samedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Kawasan Pesarean Kecamatan Adiwerna

Sebaran Kawasan strategi di Kabupaten Tegal tersebar sebagaimana peta di bawah ini.

Gambar 4. 2. Kawasan Strategis Kabupaten Tegal



Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, selesai mendasari permasalahan dan isu strategis serta pencapaian target, juga dilakukan pendekatan spasial dalam penentuan lokasi program/kegiatan sehingga diharapkan pencapaian target dapat terlaksana secara cepat. Pendekatan spasial rencana program/kegiatan khususnya untuk pengembangan infrastruktur dan wilayah di Kabupaten Tegal Tahun 2021 tertuang dalam table di bawah ini

Tabel 4. 10
Pendekatan Spasial Rencana Program/Kegiatan Tahun 2023 di Sektor Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Uraian/Program/ Kegiatan	Lokus	Keterkaitan dengan Kawasan Strategis
Program Jalan dan Program Jembatan		
1. Peningkatan Jalan dan Jembatan	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Babakan – Jatibogor – Kertasari – Kesemen - Warureja 	<ul style="list-style-type: none"> Konektifitas Pusat Pertumbuhan EKonomi Kemantran – Jatibogor – Kertsari – Warureja Kawasan Perbatasan Warureja dan Kab Pemalang
	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Babadan – Kedungjati – Bader – Balamoa 	<ul style="list-style-type: none"> Konektifitas Pusat pertumbuhan Warureja – Kedungjati – Balamoa KSK Semedo

Uraian/Program/ Kegiatan	Lokus	Keterkaitan dengan Kawasan Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> Kawasan Perbatasan Warureja dan Kab Pemalang
	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Banjaran – Balamoa 	<ul style="list-style-type: none"> Konektifitas Pertumbuhan Banjaran – Balamoa
	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Sawangan – Sigedong 	<ul style="list-style-type: none"> Pembukaan Isolasi/Jalur Evakuasi Kawasan Rawan Bencana Gunung Meletus KSP Gunung Slamet
	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Jalan Kedungjati - Kendayakakan 	<ul style="list-style-type: none"> KSK Perbatasan Kab Tegal – Pemalang (Kecamatan Warureja)
	<ul style="list-style-type: none"> Banjaranyar – Batuagung – Cenggini – Pagerkasih - Jejeg 	<ul style="list-style-type: none"> Konektifitas Pusat Pertumbuhan Banjar anyar dan Jejeg
2. Peningkatan Kapasitas (Pelebaran Jalan dan Jembaan)	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Yomani – Kalibakung _ Bojong – Tuwel – Guci 	<ul style="list-style-type: none"> Konektifitas Yomani – Kalibakung _ Bojong – Tuwel – Guci KSK Objek Wlsata Guci
	<ul style="list-style-type: none"> Ruas Larangan – Kemantran – Balamoa 	<ul style="list-style-type: none"> Konektifitas Pusat pertumbuhan Larangan – Kemantran – Balamoa – Pangkah - Bogares
3. Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan	Diperuntukan untuk Ruas/bagian ruas jalan yang kondisinya Rusak Ringan dan Sedang di seluruh wilayah kabupaten Tegal	Untuk Porsi Diprioritaskan pada Jalan- jalan strategis yang menghubungkan antar Kawasan Strategis terutama pusat – pusat pertumbuhan baru
Program Tata Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1. Penataan Kota Slawi	<ul style="list-style-type: none"> Penataan RTH Median Jalan Gadjahmada Revitalisasi Saluran Drainase Revitalisasi Trotoar Beutifikasi Spot – Spot 	Kawasan Pusat Perkotaan Slawi

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.10. Prioritas Pembangunan Daerah Pendukung Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan Tahun 2023 ditargetkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal, Berikut disajikan tabel prioritas pembangunan daerah pendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 4. 11
Prioritas Pembangunan Pendukung Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Produktifitas Pariwisata	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Penguatan dan Pengembangan Destinasi Wisata Ramah Lingkungan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		
				Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		
				Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1.000.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Peningkatan Efektifitas Pemasaran Wisata	Program Pemasaran Pariwisata		
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		
				Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	767.500.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		
				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	75.000.000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
				Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota	100.000.000	DPMPTSP
			Pengembangan SDM Pariwisata Kreatif	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	453.394.000	DPMPTSP
2.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Akselerasi Kemudahan Investasi Khususnya yang Membuka Lapangan Kerja	Program Promosi Penanaman Modal		
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	DPMPTSP
3.	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era Tatanan Baru	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan		
				Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	167.740.000	DAGKOP-UKM
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		
				Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		
				SubKeg (Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan)	2.700.000.000	DAGKOP-UKM
			Pemulihan dan Pengembangan UMKM	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100.000.000	DAGKOP-UKM
				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	75.000.000	DAGKOP-UKM
				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,	65.000.000	DAGKOP-UKM

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				serta Desain dan Teknologi		
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100.000.000	DAGKOP-UKM
				Program Pengembangan UMKM		
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	65.000.000	DAGKOP-UKM
4.	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	Dinas Perinaker
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	7.000.000	Dinas Perinaker
				Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	35.000.000	Dinas Perinaker

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
5.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja		
				Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	50.000.000	Dinas Perinaker
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja		
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	836.229.000	Dinas Perinaker
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	Dinas Perinaker
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	Dinas Perinaker
			Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja		
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Perinaker
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	20.000.000	Dinas Perinaker
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Perinaker
			Peningkatan Akselerasi Kemudahan Investasi Khususnya yang Membuka Lapangan Kerja	Program Hubungan Industrial		
				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	33.000.000	Dinas Perinaker
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	80.000.000	Dinas Perinaker

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		
6.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian Kreatif Ramah Lingkungan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		
				Pengembangan Prasarana Pertanian		
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2	93.360.000	Dinas KPTan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	320.000.000	Dinas KPTan
				Pembangunan Prasarana Pertanian		
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	450.000.000	Dinas KPTan
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	237.800.000	Dinas KPTan
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		
				Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman	258.000.000	Dinas KPTan
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	20.000.000	Dinas KPTan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1.000.000.000	Dinas KPTan
				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	486.640.000	Dinas KPTan
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		
				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	200.00.000	Dinas KPTan
			Penguatan dan Diversifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	35.00.000	Dinas KPTan

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2023 akan memprioritaskan pembangunan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit besar pada pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Output yang ingin dicapai adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi dan penurunan tingkat pengangguran terbuka. Sektor yang menjadi prioritas adalah sektor pariwisata, perdagangan, industri pengolahan, dan pertanian. Sementara, usaha khusus untuk menurunkan angka pengangguran juga akan menjadi perhatian.

Sektor pariwisata di Kabupaten Tegal cukup banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu, beberapa obyek wisata sudah menjadi ikon kabupaten seperti Guci, Pantai Purwahamba, dan Museum Semedo. Pariwisata juga menyumbangkan PAD yang cukup besar. Usaha yang akan dilakukan Pemkab Tegal di tahun 2023 adalah peningkatan layanan kualitas obyek wisata, perbaikan fasilitas obyek wisata, dan finalisasi obyek wisata baru yaitu hidroterapi di kawasan Guci. Pemkab Tegal juga akan tetap mendorong perkembangan obyek wisata yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa untuk mendorong kemandirian desa.

Perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi kedua terbesar pada PDRB, hampir mencapai 17%. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja, memiliki efek pengganda pendapatan yang cukup besar (1,07), serta menghasilkan daya ungkit yang kuat (1,82). Pada tahun 2023, Pemkab Tegal akan melaksanakan upaya pemulihan UMKM pasca pandemi, rehabilitasi pasar rakyat, dan stabilisasi harga komoditas melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Industri pengolahan adalah sektor dengan kontribusi terbesar pada perekonomian Kabupaten Tegal dengan share lebih dari 32%. Berdasarkan tabel input-output, komoditas pada sektor ini juga memiliki daya ungkit dan daya dorong yang besar pada perekonomian. Sektor industri pengolahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh industri logam, dan memiliki akses pada perusahaan besar multinasional (Astra, Komatsu, dsb). Untuk mendukung pengembangan sektor industri pengolahan, Pemkab Tegal pada tahun 2023 akan memfokuskan upaya untuk mempermudah kegiatan usaha industri kecil dan menengah yang berbasis masyarakat (komunal). Hal ini dilaksanakan dengan fasilitasi industri logam dengan perusahaan tier 1 dan tier 2, serta dukungan pengembangan layanan klinik industri (bantuan pengurusan PIRT, merk, ijin berusaha, dan SNI). Sementara, untuk menarik investor baru, Pemkab Tegal berupaya untuk menyediakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat finalisasi Revisi RTRW Kabupaten Tegal.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja banyak, karena sistem bertani di Kabupaten Tegal sebagian besar masih dilaksanakan secara manual (*labor intensive*). Sektor ini merupakan satu-satunya sektor dominan yang masih mencatatkan pertumbuhan positif di masa pandemi dan menjadi bantalan perekonomian. Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengembangkan sektor pertanian dengan beberapa cara di tahun 2023. Secara langsung, Pemkab akan meningkatkan layanan jalan usaha tani dan jaringan irigasi tata usaha tani, serta memberikan bantuan sarpras pertanian pada petani, termasuk pengembangan Klinik Pertanian dan Taman Teknologi Pertanian (TTP). Di sisi pengembangan teknologi, Pemkab akan melanjutkan kerjasama dengan IPB, utamanya dengan pelaksanaan KKN Tematik pertanian dan kolaborasi pengembangan produk unggulan (saat ini masih berfokus pada bawang putih dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia serta pengembangan padi organik, namun diharapkan akan dapat semakin meluas pada produk lain). Pemkab juga akan menginisiasi *matching fund* dengan perguruan tinggi, sebagai komitmen difusi inovasi teknologi pertanian. Pada komoditas ternak, Pemkab akan mengantisipasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku dengan mengalokasikan anggaran untuk obat dan vaksin.

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Tegal juga akan mendapat perhatian khusus, mengingat tren yang semakin meningkat. Bonus demografi yang dialami Kabupaten Tegal belum termanfaatkan secara optimal, sehingga angka pengangguran bertambah meskipun beberapa investasi yang masuk membutuhkan belasan ribu tenaga kerja. Upaya tercepat yang dapat dilakukan adalah mengarahkan pencari kerja yang ada untuk dapat diserap oleh pabrik-pabrik yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu, Pemkab Tegal

akan melakukan *link and match* pelatihan. Usulan kegiatan pelatihan yang berasal dari pagu indikatif kecamatan akan diarahkan agar tema pelatihannya sesuai dengan kebutuhan pabrik yang ada, juga melobi pada investor agar mau menyerap tenaga kerja peserta pelatihan. Dengan demikian, peserta pelatihan akan dapat langsung bekerja. Pemkab juga akan memfasilitasi *link and match* dengan sekolah vokasi (khususnya SMK) yang ada di Kabupaten Tegal, sesuai dengan amanat Perpres 68/2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Sedangkan di sisi *demand* pasar tenaga kerja, Pemkab akan mendorong kemudahan perijinan untuk menarik investasi baru. Selanjutnya, wirausaha juga akan dikembangkan. Pemkab berkomitmen untuk melanjutkan program Wirausaha Pemuda (WP) dan Penyedia Layanan dan Pengembangan Usaha (PLPU) sebagai inkubator alumni WP untuk mengembangkan usahanya. Diharapkan, para alumni WP akan mandiri dalam berusaha dan dapat membuka lapangan kerja baru. Pada akhirnya, semua usaha yang dilakukan Pemkab bermuara pada berkurangnya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

4.2.11. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Stunting

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menuntaskan kasus stunting. Pembangunan daerah tahun 2023 ditargetkan untuk mengurangi kasus stunting melalui prioritas daerah yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 12
Prioritas Pembangunan Penanganan Stunting

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Penguatan mutu dan transformasi kesehatan era tatanan baru	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan Dasar Berbasis TIK	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	82.840.000	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era Tatanan Baru	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Penyedia Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	96.000.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada	47.900.000	Dinas Kesehatan

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Usia Pendidikan Dasar		
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.622.640.000	Dinas Kesehatan
				Penyelenggaraan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Sosialisasi dan Pemicuan STBM Stunting	384.280.089	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3.343.000.000	Dinas Kesehatan
				Pengelolaan Kegiatan Gizi Masyarakat	4.694.000.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		
				Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1.778.000.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Bimwin Catin Tk. Kabupaten	350.630.000	Dinas Kesehatan
				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		
				Sosialisasi/ Kampanye Gemarikan	29.000.000	Dinas Perikanan
2.	Menekan Laju Tingkat Pengangguran	Peningkatan Kompetensi Angkatan Kerja dan Akselerasi Investasi untuk Perluasan Lapangan Kerja	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	50.000.000	Dinas Perinaker
			Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan	Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1.200.000	Dinas Kominfo
			Peningkatan Akselerasi Kemudahan Investasi Khususnya yang Membuka Lapangan Kerja	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di kawasan perdesaan	700.000.000	Dinas PUPR
				Belanja Bantuan Keuangan Khusus	550.000.000	Dinas PUPR

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Daerah Provinsi atau Kabupaten Kota (Program Penyediaan Sistem Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat)		
3.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian	Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian Kreatif Ramah Lingkungan	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Daya Lokal	35.000.000	Dinas KPTan
			Penguatan dan Diversifikasi Pangan			
4.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	115.000.000	Dinas Sosial
			Perluasan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Warga Miskin dan Rentan Miskin			
5.	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah dan Permukiman yang Mantap	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah	Percepatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	680.000.000	Dinas Perkim
			Penataan Ruang Kota dan Permukiman			
6.	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	Peningkatan Produktifitas Pemuda dan Olah Raga Berbasis Gender	Pengendalian Kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	225.000.000	Dinas P3AP2KB
				Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PIK	7.865.935.000	Dinas P3AP2KB

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Remaja dan PEK/UPPKS)		
7.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Pencegahan dan Pengelolaan Limbah Pencemar Lingkungan	Program Pengelolaan Persampahan		
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan	Pengelolaan Sampah	2.715.000.000	DLH
8.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar Berbasis TIK	Program Pengelolaan Pendidikan		
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	500.000.000	Dinas Dikbud
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	488.000.000	Dinas Dikbud
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	23.275.800.000	Dinas Dikbud
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	500.000.000	Dinas Dikbud
9.	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)		
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	100.000.000	Dinas Kop UKM Dag

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Pengembangan Usaha Mikro		
10.	Meningkatnya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan	Peningkatan Kualitas Keamanan dan Kenyamanan Hidup Masyarakat	Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan Kerjasama Antar Warga dan Umat Beragama	Program Administrasi Pemerintahan Desa		
			Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		
				Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	50.000.000	Dinas Permasdes
				Pembinaan dan pemberdayaan BUM Des dan lembaga kerja sama antar desa	25.000.000	Dinas Permasdes
				Pembinaan peningkatan kapasitas anggota BPD	100.000.000	Dinas Permasdes
				Pemeriksaan Laboratorium Sampel Air (Bakteri dan Fisika) dan Klorinasi	226.537.000	
				Sosialisasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	375.169.000	

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Intervensi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui skema 5 Pilar dan 8 Aksi konvergensi stunting. 5 pilar percepatan penurunan stunting meliputi komitmen pimpinan, pengarusutamaan perubahan perilaku, aksi spesifik dan sensitif, kecukupan pangan dan gizi serta pengelolaan sistem data dan informasi. Sementara 8 aksi konvergensi meliputi analisis situasi, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rembug stunting, penyusunan regulasi daerah, pemberdayaan Kader Pembangunan Manusia (KPM), manajemen data, dan evaluasi pelaporan.

Pada tahun 2023 mendasari analisis situasi yang dilakukan, ditetapkan 20 desa lokus intervensi stunting. Lokus intervensi stunting ini mendasari prevalensi stunting serta keluarga berisiko stunting di Kabupaten Tegal. Desa-desa lokus stunting pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 13
Tabel Desa Lokus Stunting Tahun 2023

No	Kecamatan	Puskesmas	Desa	Tahun Awal Penetapan
1	Margasari	Margasari	Jembayat	2022
2	Margasari	Margasari	Karangdawa	2022
3	Margasari	Margasari	Margasari	2022
4	Margasari	Margasari	Jatilaba	2022
5	Margasari	Kesambi	Prupuk Selatan	2022
6	Bumijawa	Bumijawa	Sigedong	2022
7	Bumijawa	Bumijawa	Bumijawa	2022
8	Bojong	Bojong	Rembul	2022
9	Bojong	Bojong	Tuwel	2022
10	Bojong	Bojong	Karangmulya	2022
11	Balapulang	Balapulang	Balapulang Wetan	2022
12	Lebaksiu	Lebaksiu	Yamansari	2022
13	Kedungbanteng	Kedungbanteng	Karang Anyar	2022
14	Pangkah	Pangkah	Grobog Wetan	2022
15	Slawi	Slawi	Kalisapu	2022
16	Kramat	Kramat	Bongkok	2022
17	Kramat	Kramat	Mejasem Barat	2022
18	Suradadi	Jatibogor	Jatibogor	2022
19	Suradadi	Suradadi	Kertasari	2022
20	Suradadi	Jatibogor	Harjasari	2022

Sumber: Tim Percepatan Penurunan Stunting, 2022

Untuk efektifitas pelaksanaan koordinasi dan intervensi percepatan penurunan stunting dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kab. Tegal yang diketuai oleh Wakil Bupati. Kedudukan Wakil Bupati sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) cukup strategis. Pengarah TPPS adalah Bupati dan Forkompinda, sementara pelaksana harian diampu oleh DP3AP2KB, Dinkes, dan Bappedalitbang dengan pelaksana teknis PD yang relevan.

4.2.12. Prioritas Pembangunan Daerah Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan. Pembangunan daerah tahun 2023 ditargetkan untuk mengurangi kemiskinan melalui prioritas daerah yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 14
Prioritas Pembangunan Penanganan Kemiskinan Ekstrem

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
1.	Menurunnya Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta	Perluasan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Pemberdayaan Warga Miskin	Program Rehabilitasi Sosial		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
		Pemberdayaan Ekonomi Warga Miskin dan Rentan Miskin	dan Rentan Miskin			
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial		
				Penyediaan Permakanan	2.153.000.000	Dinas Sosial
			Peningkatan Layanan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Pemberian layanan rujukan	10.000.000	Dinas Sosial
2.	Meningkatnya Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang Layak	Perluasan Akses Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Program Kawasan Permukiman		
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.400.000.000	Dinas Perkim
				RTLH (Musrenbangcam 2022)	3.900.000.000	Dinas Perkim
				RTLH (Musrenbangcam 2022)	3.900.000.000	Dinas Perkim
				Desa Merdeka Sampah (musrenbangcam 2022)	2.400.000.000	Dinas LH
				Desa Merdeka Sampah (musrenbangcam 2022)	2.400.000.000	Dinas LH
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar Berbasis TIK	Program pengelolaan pendidikan		
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.200.000.000	Dinas Dikbud
4.	Meningkatnya Produktifitas Sektor Pertanian	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Pemberdayaan petani	Program Penyuluhan Pertanian		
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	50.000.000	Dinas KPTan
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani	40.000.000	Dinas KPTan
				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	50.000.000	Dinas KPTan
			Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		
				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5.000.000	Dinas Perikanan
				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	40.000.000	Dinas Perikanan
				Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	250.000.000	Dinas Perikanan
5.	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Industri Pengolahan	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	876.229.000	Dinas Perinaker
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	836.229.000	Dinas Perinaker
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	20.000.000	Dinas Perinaker
				Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000	Dinas Perinaker
				Program Penempatan Tenaga Kerja	60.000.000	Dinas Perinaker
				Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	Dinas Perinaker
				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	20.000.000	Dinas Perinaker
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	Dinas Perinaker
6.	Meningkatnya Produktifitas di Sektor Perdagangan	Pemulihan dan Transformasi Sektor Pertanian, Perdagangan, Industri, Koperasi dan UKM, Pariwisata dan Iklim Investasi Ramah Lingkungan	Pemulihan dan Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)		
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100.000.000	Dinas Kop UKM Dag
7.		Peningkatan produktivitas	Pengendalian Kelahiran dan	Program pemberdayaan dan		

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan	Fokus	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Perangkat Daerah
	Meningkatnya pemberdayaan gender	pemuda dan olah raga berbasis gender	Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana	peningkatan keluarga sejahtera		
				Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	7.510.950.000	Dinas P3AP2KB

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Strategi percepatan penurunan kemiskinan dilakukan dengan pendekatan peningkatan pendapatan dan mengurangi pengeluaran. Mengurangi pengeluaran dilakukan antara lain melalui jaminan sosial, bantuan sosial, sifatnya *charity* pada sasaran dan lokus kemiskinan ekstrim. Sementara meningkatkan pendapatan dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi pada sasaran dan Lokus Kemiskinan Ekstrim.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah metode Pemberdayaan yaitu 1) Data kelompok sasaran adalah hasil Verval DTKS, sebanyak 1.169 orang yang akan diasesmen berdasarkan penyebab kemiskinannya. 2) Kelompok sasaran akan diintervensi melalui **pemberdayaan ekonomi**

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim Daerah metode Charity, yaitu 1) Data kelompok sasaran adalah hasil Verval DTKS, sebanyak 1.169 orang yang akan diklaster berdasarkan ciri fisik kemiskinan. 2) Kelompok sasaran akan diintervensi melalui **program charity**.

Pedoman Pemberdayaan Ekonomi (Inovasi penanggulangan kemiskinan OPD) antara lain:

- Kegiatan bersifat lengkap (menu program) dan serentak (dilaksanakan secara simultan-berkelanjutan)
- Dianggarkan secara cukup tuntas
- Kelompok sasaran diberdayakan tuntas (jumlah peserta tidak harus banyak, antara 50-100 orang)
- Kelompok sasaran harus warga miskin ekstrim sesuai data DTKS Dinsos (kluster 1.169 orang)
- Desain program dapat pemberdayaan kelompok, diutamakan pemberdayaan individu/keluarga
- Setiap sasaran menerima layanan program secara lengkap (menu program) dan serentak (dilaksanakan secara simultan-berkelanjutan) hingga terentaskan dari kemiskinan ekstrim
- Nomenklatur resmi kegiatan inovasi mengikuti Sub Kegiatan yang relevan dalam Renstra/Renja
- Nomenklatur Publik kegiatan inovasi ditetapkan OPD dalam bahasa yang mudah diingat publik
- Anggaran kegiatan inovasi bersumber dari anggaran Pagu Reguler OPD dan atau Pagu Kegiatan Strategis Kepala Daerah
- Dilakukan asistensi kematangan inovasi oleh Bidang Kelitbang Bappedalitbang
- Dilakukan asistensi penyusunan Renja oleh Bidang Perekonomian SDA Bappedalitbang

Pedoman *Charity* Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim:

- a. Dilakukan untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin ekstrim
- b. Dilakukan untuk mengintervensi program:
 1. RTLH (Disperkim)
 2. Jamban (Disperkim)
 3. Listrik
 4. BST (Dinsos)
 5. PKH (Dinsos)
 6. BLT DD (Dinsos)
 7. KIS (Dinsos)
 8. KIP (Dinsos)
 9. Desa Merdeka Sampah (DLH)
 10. Yuh Sekolah Maning (Disdikbud)
- c. Kegiatan yang sudah ada, diarahkan dilakukan dengan kelompok sasaran dan lokus kemiskinan ekstrim.

Untuk mengetahui kebutuhan pemberdayaan terhadap kelompok sasaran kemiskinan ekstrem telah dilakukan asesment oleh TKPKD Kab. Tegal dengan pelaksana Dinsos dan pelaksana lapangan pendamping PKH di masing-masing kecamatan. Hasil asesmen pemberdayaan meliputi jenis-jenis kebutuhan kelompok sasaran sebagai berikut.

Tabel 4. 15
Kebutuhan Pemberdayaan Kelompok Sasaran Kemiskinan Ekstrem

KEBUTUHAN	JML	%
PELATIHAN UEP DAN MODAL USAHA	360	43.64
PELATIHAN , PERALATAN (GEROBAK,ETALASI,DAGANG) DAN MODAL KERJA	20	2.42
PELATIHAN DAN MODAL USAHA PETERNAKAN (KAMBING, SAPI, UNGGAS)	168	20.36
ALAT BENGKEL DAN MODAL USAHA	2	0.24
ALAT PERTUKANAN DAN MODAL USAHA	11	1.33
ALAT BANTU PENDENGARAN	1	0.12
MODAL DAN PERALATAN PERTANIAN	60	7.27
BANTUAN UANG UNTUK PENGobatan	3	0.36
BIAYA SEWA TEMPAT USAHA PIJAT	2	0.24
GEROBAK UNTUK CARI RONGSOKAN	1	0.12
MESIN JAHIT BESERTA PERLENGKAPANNYA	15	1.82
MODAL USAHA, PELATIHAN TATA BOGA	34	4.12
MODAL DAN PELATIHAN ONLINE	2	0.24
MODAL DAN PERALATAN ANYAMAN BAMBU	1	0.12
PELATIHAN PENGEMBANGAN USAHA ARANG, MODAL KERJA	1	0.12
PENGUATAN (MOTIVASI)	17	2.06
PENGEMBANGAN USAHA LAS	1	0.12
PERALATAN LOUNDRY	1	0.12
PERALATAN SERVIS ELEKTRONIK	1	0.12
PERALATAN SOUNDSYSTEM	1	0.12
PERLENGKAPAN USAHA LAYOS	1	0.12
TIDAK DITEMUKAN	2	0.24
PENAMPINGAN LANSIA	120	14.55
TOTAL JUMLAH	825	100.00

Sumber: TKPKD, 2022

Adapun desa lokus kemiskinan ekstrem adalah:

Tabel 4. 16
Desa Lokus Kemiskinan Ekstrem

No.	Kecamatan	Desa
1	Bumijawa	Bumijawa
		Sokasari
		Begawat
		Muncanglarang
		Dukuhbenda
2	Jatinegara	Argatawang
		Sitail
		Mokaha
		Sumbarang
		Padasari
3	Balapulang	Pamiritan
		Harjowinangun
		Tembongwah
		Balapulang Wetan
		Danareja
4	Bojong	Dukuhtengah
		Danasari
		Karangmulya
		Kajenengan
		Cikura
5	Lebaksiu	Dukuhlo
		Slarang Kidul
		Tegalandong
		Timbangreja
		Kambangan

Sumber: TKPKD, 2022

4.2.13. Inovasi Kebijakan Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang inovatif. Pembangunan yang inovatif diinisiasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tegal menginisiasi inovasi **ABANG KUWAT**.

Inovasi **ABANG KUWAT** yang merupakan akrononim dari Akselerasi pembANGunan melalui Kolaborasi UMKM-Wirausaha Kabupaten Tegal disusun secara sistematis dan komprehensif melalui pendekatan Tematik Holistik Integratif dan Spasial. Dalam kerangka tematik, tema ekonomi mikro kecil dan menengah diambil sebagai fokus inovasi mengingat sektor itulah yang paling mampu mendorong daya saing wilayah dan membangkitkan ekonomi masyarakat dari bawah sekaligus mampu menekan angka kemiskinan dan pengangguran yang telah menjadi momok utama Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir.

Latar belakang dari inovasi **ABANG KUWAT** adalah dampak dari pandemi covid-19 terutama pada sektor perdagangan khususnya UMKM. Padahal sektor inilah yang sejatinya penopang ekonomi saat terjadi krisis ekonomi baik krisis ekonomi tahun 1998

maupun 2008. Namun pandemi saat ini dirasakan begitu dahsyat dan mampu merusak struktur ekonomi hingga tingkat mikro.

Pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal telah berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi di tahun 2020 yang berkontraksi -1,46% dimana sektor perdagangan terjun diangka -4,20%. Pada subsektor perdagangan, jumlah UMKM di Kabupaten Tegal tahun 2021 terdata 140.430 unit UMKM di tahun 2021 dengan serapan tenaga kerja sebanyak 286.860 orang dan omset totalnya mencapai Rp. 2,527 miliar. Namun total omset tersebut berkurang drastis dibandingkan omset UMKM di tahun 2020 yang mencapai Rp. 5,826 miliar atau terjadi penurunan omset sebesar 56,67%. Hal tersebut menggambarkan dampak covid-19 terhadap pelaku UMKM begitu besar dan perlu mendapatkan perhatian lebih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

Tertekannya sektor usaha mikro kecil dan menengah telah menyebabkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tegal naik cukup signifikan. Angka Kemiskinan Kabupaten Tegal di tahun 2021 tercatat 8,60% naik dibandingkan tahun 2020 pada saat awal pandemi yang mencapai 8,14%. Untuk angka pengangguran sendiri di tahun 2021 mencapai 9,97% di mana saat awal pandemi di tahun 2020 mencapai 9,82%.

Guna mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah, sektor UMKM perlu didorong, difasilitasi dan diberdayakan agar dapat tumbuh dan bangkit dari himpitan dampak covid-19 yang hingga saat ini masih berlangsung. Untuk dapat menumbuhkan dan membangkitkan UMKM diperlukan upaya dan terobosan yang luar biasa melalui suatu inovasi yang terkolaborasi. Untuk itu perlu dirumuskan, dibangun dan diterapkan inovasi yang terkolaborasi dalam rangka pemulihan ekonomi daerah melalui inovasi ABANG KUWAT (**A**kselerasi **pemBANG**unan melalui **Kolaborasi UMKM-Wirausaha** Kabupaten Tegal).

RKP tahun 2023 disusun dengan penekanan pada **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,9 persen pada tahun 2023. Untuk itu di tahun 2023 sangat strategis bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pemulihan daya beli masyarakat dan dunia usaha serta diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari covid-19 serta mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Sejalan dengan arah kebijakan fokus pembangunan pada RKP 2023, inovasi ABANG KUWAT ditujukan khusus untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi daerah pada sektor mikro yang terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana substansi arah kebijakan RKP tahun 2023, inovasi yang merupakan suatu kolaborasi ini juga memiliki muatan: 1) Pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha; 2) Pemberian bantuan untuk menjaga daya beli rumah tangga; 3) Percepatan pembangunan infrastruktur secara padat karya; dan 4) Diversifikasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk UMKM.

Ruang lingkup inovasi ABANG KUWAT terdiri dari 3 komponen utama yaitu komponen input, proses dan output. Ruang lingkup input yang dimaksud adalah kolaborasi inovasi yang disusun ditujukan untuk penyediaan pelaku bisnis yang handal, penguatan rencana bisnis UMKM, penguatan modal UMKM, dan penguatan nilai tambah dan daya saing produk UMKM. Ruang lingkup proses yang dimaksud adalah kolaborasi inovasi yang disusun ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen usaha yang terdigitalisasi dan kerjasama kemitraan ekonomi rakyat. Sedangkan ruang lingkup output yang dimaksud adalah kolaborasi inovasi yang disusun ditujukan untuk penguatan pada aspek

pemasaran produk khususnya secara digital, dan kemitraan dengan pasar *online* dan *offline*.

Tujuan inovasi ABANG KUWAT adalah untuk akselerasi pemulihan ekonomi masyarakat melalui penumbuhan dan pembangkitan UMKM sekaligus dalam rangka menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Sasaran dari Inovasi ABANG KUWAT adalah para pelaku UMKM dan masyarakat usia produktif yang potensial.

Kebaruan inovasi ABANG KUWAT terletak pada aspek kolaboratifnya yang menyentuh dari sektor hulu sampai hilir. Artinya inovasi ABANG KUWAT bukan inovasi yang berdiri sendiri namun merupakan inovasi yang menumbuhkan inovasi-inovasi lainnya yang diformulasikan dan ditarik berdasarkan isu-isu UMKM lintas sektoral untuk membangkitkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal secara bersama-sama. Masing-masing prioritas isu lintas sektoral itulah yang kemudian dijadikan dasar membangun inovasi-inovasi yang terkolaborasi dengan sentuhan digitalisasi dan partisipasi dari masing-masing stakeholder dalam mencapai tujuan yang sama yaitu memulihkan ekonomi wilayah melalui kebangkitan ekonomi masyarakat Kabupaten Tegal.

Rangkaian konsep dasar inovasi ABANG KUWAT disusun dengan memperhatikan keterkaitan indikator dalam suatu *Logical Framework* untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka pemulihan ekonomi melalui penumbuhan dan pembangkitan UMKM. Adapun *Logical Framework* inovasi ABANG KUWAT dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 4. 17
Kerangka Kerja Logis (KKL) Inovasi ABANG KUWAT

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
Dampak	Menurunkan angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan
	Menurunkan angka pengangguran	Tingkat Penganggutan Terbuka
Outcome Antara	Menciptakan ekosistem pendukung UMKM	Jumlah ekosistem UMKM
Outcome Langsung	Meningkatnya pendapatan usaha	Pendapatan perkapita pelaku UMKM
	Meningkatnya pelaku usaha mikro kecil menengah	Jumlah pelaku usaha mikro kecil menengah
Output	Tersusunnya Inovasi lintas sektor yang terkolaborasi	Jumlah inovasi lintas sektoral yang terkolaborasi
Kegiatan/Proses	Tersusunnya SOP kolaborasi inovasi	Jumlag rapat koordinasi
	Terlaksananya rapat koordinasi pembahasan inovasi lintas sektoral	Jumlah SOP yang tersusun
Input	Tersedianya Dana	Jumlah dana yang tersedia
	Tersedianya regulasi pendukung	Jumlah regulasi yang ditetapkan
	Tersedianya lembaga inkubator bisnis	Jumlah lembaga fungsi inkubator
	Tersedianya kerjasama kemitraan (MoU/PKS)	Jumlah kerjasama kemitraan

Uraian	Kriteria Keberhasilan	Indikator Kinerja
	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	Jumlah sarana dan prasarana pendukung
	Tersedianya Tim kerja kolaborasi penumbuhan wirausaha pemuda	Jumlah Tim Kerja yang dibentuk
Permasalahan	Pelaku usaha mikro kecil dan menengah banyak yang bangkrut dan/atau pendapatannya menurun tajam	
Penyebab Masalah	Pemasaran terbatas	
	Manajemen usaha kurang produktif	
	Daya saing produk rendah	
	Daya saing pelaku usaha rendah	
	Kekurangan modal usaha	

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Secara utuh tahapan inovasi ABANG KUWAT dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan dan Penguatan Ekosistem
Pada tahap ini berbagai komponen ekosistem penumbuhan dan pembangkitan UMKM dibentuk dan/atau dikembangkan. Mulai dari Regulasi Dasar disiapkan, SDM dikuatkan, Lembaga Pendukung dan Lembaga Kolaborasi dibentuk dan dikuatkan dengan Tata Kelola memadai, Sarana dan Prasarana Pendukung disediakan, serta Skema Pembiayaan yang terjamin dan berkelanjutan.
- 2) Pembentukan Tim Kerja Kolaborasi
Tim kerja Kolaborasi terdiri dari tiga (3) bagian yaitu 1) Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda; 2) Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda; 3) Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda.
- 3) Perumusan Kerangka Kolaborasi Inovasi
Pada tahap ini dirumuskan skema kerja kolaborasi inovasi, mekanisme kolaborasi dan inventarisasi stakeholder yang terkait. Dalam tahap ini pula diidentifikasi kerjasama-kerjasama yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kolaborasi inovasi.
- 4) Penguatan Kebijakan dan Regulasi Inovasi
Setelah tim terbentuk dan kerangka kolaborasi inovasi tersusun, kemudian dikuatkan melalui kebijakan pendukung. Kebijakan tersebut berupa regulasi pendukung baik itu Perda, Perbub SK Bupati dan surat edaran Bupati. Selain itu juga dilakukan pengikatan kerjasama antar pihak dalam suatu Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama khususnya dengan lembaga pihak luar yang terlibat didalamnya. Karena Inovasi ini pada dasarnya dibangun atas inovasi-inovasi yang dikolaborasikan, maka kebijakan dan regulasi tiap-tiap inovasi dapat beraneka ragam yang disusun oleh tiap-tiap penganggung jawab inovasi.



























- 5) **Penetapan Inovasi Kolaboratif**
Untuk memastikan bahwa inovasi yang akan dilaksanakan dapat berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama, maka setiap inovasi yang akan dijalankan diarahkan pada masing-masing peran yang spesifik berdasarkan aspek masalah yang akan dipecahkan. Kemudian masing-masing inovasi kolaboratif ditetapkan melalui suatu surat keputusan kepala masing-masing pelaksana inovasi.
- 6) **Publikasi dan Sosialisasi**
Sebelum memulai pelaksanaan kolaborasi inovasi dilakukan publikasi dan sosialisasi kepada seluruh pihak yang terkait baik itu pelaksana inovasi yang akan dikolaborasikan, dan mitra yang terlibat pada suatu inovasi serta sasaran penerima manfaat inovasi yang akan dikolaborasikan. Publikasi dan Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui media cetak dan elektronik.
- 7) **Pelaksanaan Kolaborasi Inovasi**
Pelaksanaan tiap inovasi kolaboratif tidak harus dilakukan secara serentak. Namun ketika suatu inovasi sudah bernilai kolaboratif dan siap diterapkan, dapat dilakukan secara langsung maupun bertahap, tergantung kesiapan pelaksana dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.
- 8) **Monitoring dan Evaluasi**
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan inovasi sudah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perencanaannya. Jika dalam pelaksanaan suatu inovasi terdapat distorsi, maka tim kerja kolaborasi dapat memberikan saran masukan pelaksanaan inovasi agar dapat memainkan peran yang telah ditentukan.
- 9) **Pengembangan Kolaborasi Inovasi**
Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kolaborasi inovasi dirumuskan konsep penyempurnaan dan pengembangan suatu inovasi. Penyempurnaan dan pengembangan bisa diterapkan secara langsung jika memang itu memungkinkan atau menunggu satu rangkaian selesai kemudian disempurnakan dan dikembangkan untuk pelaksanaan kolaborasi yang berikutnya.

Pelaksanaan inovasi ABANG KUWAT telah dipayungi melalui Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, kemudian Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Tegal, Keputusan Bupati Nomor 1683 Tahun 2019 tentang Penetapan Inovasi Daerah, dan Keputusan Bupati Nomor 070/102 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penumbuhan dan Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, Tim Kerja Kolaborasi Penumbuhan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal, dan Tim Kerja Kolaborasi Pengembangan Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal.

Inovasi ABANG KUWAT akan menyinergikan dan menciptakan sub-inovasi kolaboratif yang diinisiasi oleh Perangkat Daerah Kabupaten Tegal bersama masing-masing Mitranya. Adapun pihak-pihak yang terlibat didalamnya sudah mewakili konsep *Pentahelix* pelaksana inovasi baik itu Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerahnya pengusul dan pelaksana inovasi, kemudian Akademisi sebagai mitra pengusul dan tim pelaksana maupun evaluator pelaksanaan kolaborasi inovasi. Media sebagai penyampai informasi dan media edukasi serta pemasaran produk suatu inovasi. Dunia usaha sebagai mitra pengusul dan pelaksanaan inovasi ABANG KUWAT, dan masyarakat dan komunitas

sendiri sebagai penerima manfaat suatu inovasi. Pelaksanaan inovasi ABANG KUWAT sebagian besar telah menerapkan konsep digitalisasi ke dalam semua aspek pengembangan dan pembangkitan UMKM. Untuk mendukung inovasi juga sudah tersedia fasilitas UMKM Center sebagai pendukung inkubator UMKM yang didalamnya memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap. Dalam melaksanakan inovasi dipandu melalui sebuah SOP umum pelaksanaan kolaborasi inovasi yaitu sebagai berikut.

Tabel 4. 18
SOP ABANG KUWAT

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		OPD	Tim Pelaksana	Mitra	Tim Kolaborasi	Sekda	Bupati	Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Arahan Konsep Kebijakan Penumbuhan dan Pembangkitan UMKM								Naskah Arahan Konsep	1 Hari	Notulensi Rapat
2	Penetapan Regulasi Penumbuhan dan Pembangkitan UMKM								Draft Perbup	1 minggu	Perbup
3	Pembentukan Tim Kolaborasi								Draft SK Tim	3 hari	SK Tim Kolaborasi
4	Penyusunan Konsep Kolaborasi Inovasi								Surat Ajuan dan Naskah Arahan Konsep Bupati	1 bulan	Konsep Kerja Kolaborasi
5	Menelaah dan menyetujui konsep Kolaborasi								Konsep Kerja Kolaborasi	2 hari	surat rekomendasi
6	Sosialisasi dan Diseminasi Konsep Kolaborasi Inovasi kepada Stakeholder								Konsep Kerja Kolaborasi	1 bulan	Rapat Sosialisasi
7	Menyusun dan mengusulkan konsep inovasi kolaboratif OPD								KAK Inovasi dan Draft Tim Pelaksana	1 bulan	surat usulan
8	Menelaah dan menyetujui konsep inovasi kolaboratif								Surat Ajuan, KAK Inovasi dan Draft Tim Pelaksana	3 hari	surat rekomendasi
9	Penetapan Inovasi dan Tim Pelaksana Inovasi								Surat rekomendasi Tim kolaboratif	1 Hari	SK Tim dan SK Penetapan inovasi
10	Menjalin kerjasama dengan Mitra								Draft MoU dan PKS	45 hari	MoU dan PKS
11	Sosialisasi Pra Pelaksanaan Inovasi								undangan dan Materi Sosialisasi	1minggu	Daftar Hadir Peserta
12	Pelaksanaan Inovasi Kolaboratif								Laporan Pelaksanaan	1 tahun	Laporan Pelaksanaan
13	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inovasi Kolaboratif								Foto Monev, daftar kendala	1 bulan	Saran Rekomendasi Tim kolaborasi
14	Perbaikan dan Pengembangan								Saran Rekomendasi Tim kolaborasi	1 bulan	Laporan perbaikan dan pengembangan inovasi

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Dalam pelaksanaan inovasi-inovasi kolaboratif terdapat beberapa kendala umum yang dihadapi antara lain: tidak semua penerima manfaat inovasi itu melek teknologi dan tidak mempunyai perangkat teknologi pendukung seperti smartphone, laptop, koneksi internet. Sementara banyak inovasi yang arahnya ke pembentukan dan penguatan UMKM digital dan ekonomi kreatif. Selain itu diperlukan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan mengingat banyak penerima manfaat inovasi yang belum bisa mandiri menerima dan mengaplikasikan program inovasi tersebut.

Kerangka pemantauan/pengendalian dan evaluasi (dalev) dilakukan secara berjenjang dan berlapis. Tahapannya dalev dilakukan mandiri oleh Tim Pelaksana setiap triwulan kemudian dilaporkan ke Tim Kolaborasi yang kemudian mengkaji laporan dan membuat rekomendasi tindak lanjut untuk dilaksanakan oleh Tim Pelaksana. Selanjutnya Bupati melakukan dalev inovasi kolaboratif kepada Tim Kolaborasi maupun langsung ke lapangan untuk memastikan segala kendala pelaksanaan inovasi kolaboratif dapat berjalan dengan lancar. Selain itu terdapat kendala dalam melaksanakan dalev kinerja inovasi mengingat ukuran keberhasilan inovasi kolaboratif ini sebagian besar menggunakan data mikro yang tidak tersedia. Untuk itu diperlukan teknik dan pendekatan tersendiri untuk menilai capaian kinerja inovasi khususnya pada level *outcome* dan *impact*.

Target inovasi ABANG KUWAT tahun 2023 mampu menghasilkan 23 inovasi kolaboratif, dengan target kinerja langsung dari inovasi ini bisa dilihat dari munculnya unit UMKM baru di tahun 2023 sebanyak 10.000 unit yang mampu menyerap tenaga kerja baru sebanyak 30.000 orang. Adapun kinerja peningkatan pendapatan UMKM naik $\pm 10\%$. Secara umum kondisi tersebut diharapkan akan mampu menopang ekonomi Kabupaten Tegal kedepan khususnya dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan daya saing.

Tabel 4. 19
Output Inovasi ABANG KUWAT

No	Output Inovasi	Sasaran Inovasi	Output	Outcome	Keunggulan	Penanggung Jawab/Inisiator Inovasi	Mitra
1	UMKM Kabupaten Tegal Go Digital	Pelaku Usaha dan Penduduk usia produktif	Pelatihan, Manajemen dan Pemasaran UMKM Digital	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha	Pelatihan Kelas Sinergi dan Kasir berbasis Digital	Disdagkop UMKM	PT. Kasyr
2	Digital Talent Scholarship	Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum	Pelatihan Tenaga Kerja Digital	Meningkatnya daya saing tenaga kerja digital	Pelatihan Keterampilan Digitalisasi secara dini	Dinas Kominfo	Kemkominfo
3	Kelas Usaha Ekonomi Kreatif	Pelaku Usaha dan Penduduk usia produktif	Pelatihan UMKM da Industri Kreatif	Meningkatnya jumlah pelaku usaha UMKM	Menyentuh usaha kreatif	Dinakerin	Kemeterian Parekraf
4	Kredit Usaha Daerah	Pelaku Usaha	Bantuan Modal Usaha up to 25 juta	Meningkatnya kelas UMKM	Bunga rendah dan mudah	Disdagkop UMKM	Bank TGR
5	Kredit Berkah	Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum	Bantuan Modal Usaha up to 5 juta tanpa jaminan	Meningkatnya jumlah pelaku usaha UMKM	Bunga rendah dan mudah dan tanpa jaminan	Disdagkop UMKM	BKK Tegal
6	Kredit Kluster Domba	Pelaku usaha peternakan kambing berbasis kelompok	Fasilitasi Modal Usaha berbasis kluster dan penyediaan off taker sekaligus	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Domba	Langsung disediakan off taker sehingga pasar terjamin	Disnaktan dan OJK	PT Bank Sinarmas dan CV Dian Pucuk Lestari
7	Wirausaha Pemuda Kabupaten Tegal	Pemuda usia 18-28 tahun	Fasilitasi Pelatihan, pembinaan, Pendampingan, Permodalan dan Kemitraan Usaha	Meningkatnya jumlah pelaku usaha	Ekosistem Wirausaha yang lengkap dan dukungan PLPU	Bappeda dan Litbang	Organisasi Pemuda
8	Pengembangan Desa Wisata	Pelaku usaha desa wisata	Fasilitasi pemasaran wisata kepada seluruh link/chanel yang dimiliki pemda dan stimulan kebijakan wisata	Meningkatnya pengunjung wisata desa	Kegiatan jamuan dan tamu di arahkan ke desa wisata	Diporapar	Pelaku Usaha Wisata Desa
9	Bazar UMKM	Pelaku usaha UMKM	Penyediaan ruang jualan di halaman OPD	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha	Himbauan PNS untuk membeli produk UMKM dalam bazar	Disdagkop UMKM	Seluruh OPD Kabupaten Tegal
10	Jalabia	Pelaku usaha UMKM	Fasilitasi pemasaran melalui medsos Pemkab Tegal (Youtube, Instagram, Tiktok, Twitter, Facebook)	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha	Rating produk meningkat dengan adanya testimoni Bupati	Bagian Humas Setda	-
11	UMKM Center	Pelaku usaha UMKM	Inkubator UMKM	Meningkatnya jumlah pelaku usaha UMKM	ketersediaan ekosistem penumbuhan dan pengembangan UMKM	Disdagkop UMKM	-
12	Slawi Batik Fashion Runway	Pelaku Usaha Batik dan Fashion	Fashion Show dan Pemasaran Batik di Rest Area Gratis	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Batik	Pasar luas dan sewa Gratis dari Pemilik Rest Area	Disdagkop UMKM	Pemilik Rest Area dan Forum Komunitas Perancang Busana
13	Festival Film Tegal	Pelaku usaha perfilman dan Foto	Insentif Sineas Film Lokal dan Pemasaran	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Perfilman	Menyentuh pelaku usaha perfilman lokal yang jarang tersentuh	Kominfo	-

No	Output Inovasi	Sasaran Inovasi	Output	Outcome	Keunggulan	Penanggung Jawab/Inisiator Inovasi	Mitra
14	Batir Tegal	Masyarakat Umum	Aplikasi untuk mencari lowongan pekerjaan dan jualan produk UMKM	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha	Berbasis web dan apk android	Bappeda dan Litbang	IAIN Salatiga
15	Virtual Tourism	Pelaku usaha pariwisata	Aplikasi pemasaran obyek wisata melalui pengalaman virtual tour	Meningkatnya pengunjung obyek wisata	Berbasis web mengusung virtual tour	Bappeda dan Litbang	Poltek Harapan Bersama
16	Budidaya Magot masyarakat	Masyarakat Umum	Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan dan Pemasaran Usaha Magot	Meningkatnya jumlah dan pendapatan pelaku usaha magot	Usaha rendah Modal dan Mudah	Dinas Peternakan	Komunitas Peternak Magot
17	Usaha Ekonomi Produktif Karang Taruna	Pemuda Karang Taruna	Pelatihan, Pembinaan, Pendampingan dan Pemasaran Usaha	Meningkatnya jumlah dan pendapatdari pemuda karang taruna	Pemberdayaan sesuai potensi masing-masing wilayah	Disporapar	-
18	UMKM Bangkit	Pelaku UMKM	Regulasi Penumbuhan dan Pembangkitan UMKM	Meningkatnya jumlah dan pendapatan pelaku UMKM	Adanya Surat Bupati Tegal Edaran Nomor 510/22/4077 tentang Kewajiban Pembelian dan Penggunaan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kab. Tegal	Disdagkop UMKM	OJK
19	Lelaki (Lele Lahan Kering)	Pembudidaya lele dan masyarakat yang tinggal di area lahan kering	Bantuan usaha budidaya lele di lahan kering	Meningkatnya jumlah pembudidaya lele lahan kering dan pendapatannya	Pamanfaatan Lahan Kering untuk budidaya lele	Dinas Perikanan	-
20	Pegembangan Usaha Budidaya Udang	Peternak Udang	Bantuan exavator	Meningkatnya produksi udang	Peningaktan produktifitas petani udang	Dinas Perikanan	-
21	Pengembangan Budidaya Ikan	Poklaksar Ikan	Bantuan Frezer	Meningkatnya nilai jual ikan	Meningkatkan ketahanan kualitas produk	Dinas Perikanan	-
22	Kabupaten Tegal Ramah Investasi	Investor	Pemasaran dan Kerjasama dengan Investor	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Mampu menyerap tenaga kerja lokal hingga 15 ribu TK	DPMPSTP	PT. LEA dan PT. Winners
23	Bantuan Keuangan Desa Padat karya	Masyarakat Desa	Regulasi Bantuan Keuangan Desa untuk Kegiatan Padat Karya	Meningkatnya pendapatan masyarakat desa	Kegiatan dan manfaat dilakukan dan dirasakan langsung oleh masyarakat desa	Dinas Permasdes	Pemerintah Desa
24	E-Katalogisasi Produk UMKM	Pelaku UMKM	E-Katalog Produk UMKM Lokal terintegrasi SHS Kab. Tegal	Meningkatnya pendapatan pelaku UMKM	Produk UMKM terdaftar dapat terserap melalui belanja daerah	Disdagkop UMKM	Bagian Unit Layanan Pengadaan Setda dan Masyarakat

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

Selain inovasi **ABANG KUWAT** beberapa inovasi yang telah diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dalam kebijakan pembangunan daerah sebagai berikut.

Tabel 4. 20
Inovasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi
A Prioritas: Penguatan kualitas layanan pemerintahan dan efektifitas pembangunan yang inovatif dan berbasis TIK		
1.	Klinik/POJOK Perencana	Klinik/Pojok Perencana bertujuan untuk melayani siapapun baik masyarakat umum maupun ASN yang akan sharing, berbincang, berdiskusi, konsultasi, belajar terkait perencanaan pembangunan daerah sesuai tema yang diusulkan. Siapapun dapat membuat ajuan waktu pertemuan di kantor Bappedalitbang secara online yang kemudian secara berjenjang akan muncul disposisi dan jadwal pertemuan. Pengusul cukup masuk di Website Bappedalitbang, kemudian mengisi format yang telah disediakan kemudian menunggu penjadwalan saja. Diskusi Pojok Perencana tidak hanya satu arah dalam artian kita sama-sama belajar untuk meningkatkan efektifitas pembangunan di Kabupaten Tegal.
2	Lahir Olih Akta Kelahiran (LOAK)	Program yang menjamin setiap bayi yang lahir di fasilitas kesehatan langsung mendapat NIK, terdaftar dalam KK dan memperoleh Akta Kelahiran.
3	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Mengintegrasikan pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan IMB dan pembayaran PBB. Di setiap kecamatan dibangun Rumah PATEN, ruangan yang representatif dan mandiri.
4	Musrenbang Award	Musrenbang Award diberikan kepada OPD yang melaksanakan Forum OPD dan Kecamatan yang menyelenggarakan Musrenbangcam dengan baik, meliputi dinamika forum, kualitas usulan masyarakat yang didanai PIK, inovasi pelaksanaan Musrenbang hingga keterwakilan perempuan dalam forum
5	Pagu Indikatif Kecamatan (PIK)	PIK dialokasikan untuk wilayah kecamatan, senilai antara Rp. 2-3 miliar per kecamatan. Alokasi tersebut merupakan perencanaan bergaransi, artinya pagu diberikan kepada wilayah dan masyarakat sendiri yang menentukan peruntukannya melalui Musrenbangcam sesuai kriteria yang ditetapkan. Dengan demikian, Musrenbangcam pasti/menjamin realisasi usulan masyarakat melalui Musrenbangcam.
6	Peraturan Bupati tentang Pengembangan Inovasi	Pemerintah Kabupaten Tegal berupaya menstimulasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus berinovasi terhadap segala bentuk peningkatan layanannya. Melalui inovasi yang muncul dari OPD juga diharapkan dapat merangasng masyarakat untuk melakukan inovasi-inovasi diberbagai bidang. Untuk itu dibentuk Peraturan Bupati yang mewajibkan seluruh Eselon II dan Eselon III untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya minimal 1 inovasi tiap tahunnya.
B Prioritas: Peningkatan kualitas layanan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan ekonomi warga miskin dan rentan miskin		
7	Data kelompok sasaran program secara tunggal	Pemerintah Kabupaten Tegal berkomitmen untuk menggunakan data Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015 sebagai basis data kelompok penerima sasaran setiap program pembangunan. Sampai saat ini PBDT 2015 telah menjadi acuan kelompok sasaran penerima manfaat program PDPM, penanggulangan kemiskinan, hingga kepesertaan JKN PBI.
8	Penyediaan jaminan hidup miskin absolut	Masih terdapat warga miskin absolut, yaitu tidak punya tempat tinggal milik sendiri, hidup di bantaran sungai, tidak ada yang memelihara, tidak punya penghasilan, dan bergantung belas kasihan warga, serta sakit berat dan tidak mampu berobat. Pemerintah akan memfasilitasi jaminan rumah (jarum) bagi warga yang belum memiliki rumah, jaminan hidup (jadup) berupa uang saku setiap bulan bagi warga yang tidak produktif, serta jaminan kesehatan (jakes) bagi warga miskin yang sakit berat dan tidak termasuk sakit yang dibiayai JKN

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi
9	Rencana Aksi Bersama (RAB) Penanggulangan Kemiskinan Daerah (PKD)	RAB PKD merupakan MoU antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk mengintervensi penduduk miskin yang belum memiliki rumah layak huni, jamban sehat, anak putus sekolah dan pemberdayaan difabel. Pemkab mengintervensi melalui APBD, Pemdes mengintervensi melalui APBDesa, terutama melalui Dana Desa.
10	Tanggap Wong Miskin	Merupakan sistem layanan rujukan terpadu yang memfasilitasi kebutuhan orang miskin yang bersifat mendesak dan memerlukan penanganan segera. Layanan diberikan di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Pembiayaan pelayanan diberikan dengan mekanisme sharing antara anggaran reguler pemerintah, CSR, dan partisipasi publi.
C	Prioritas: Perluasan akses infrastruktur dasar dan konektifitas wilayah serta Peningkatan kualitas lingkungan hidup	
11	Jalan Bebas Lubang	Kebijakan Jalan Bebas Lubang diintervensi melalui strategi manajemen pemeliharaan jalan (pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala) serta peningkatan jalan (perbaikan struktur dan pelebaran jalan). Dalam rangka aksi cepat tanggap pemeliharaan jalan rutin didesain regu-regu reaksi cepat yang rutin melakukan pendataan, dilengkapi sarana dan prasarana serta material pemeliharaan jalan yang cukup.
12	Kampung Ora Kumuh	Merupakan bantuan keuangan kepada desa untuk penuntasan kawasan kumuh 0 Ha di Kabupaten Tegal. Upaya yang dilakukan melalui penadatan dan penetapan kawasan intervensi, pembentukan dan penguatan lembaga pelaksana (Badan Keswadayaan Masyarakat), penyelenggaraan kegiatan pengelolaan sampah, penyelenggaraan kegiatan pengelolaan air bersih, dan penataan kawasan lingkungan kumuh.
13	Program Merdeka Sampah	Merupakan skema bantuan keuangan kepada desa senilai Rp. 100 juta/desa untuk pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pengurangan, pengangkutan dan pemrosesan sampah secara holistik, terpadu, swakarsa, dan pemberdayaan. Desa lokasi program menyediakan lahan TPS 3R, pembentukan lembaga pengelola, hingga menyiapkan regulasi peraturan desa tentang pengelolaan sampah di desa.
D	Prioritas: Penguatan mutu dan transformasi pendidikan dan kesehatan era tatanan baru	
14	Yuh Sekolah Maning	Mengembalikan anak usia sekolah yang tidak sekolah ke jenjang pendidikan baik formal maupun nonformal. Setiap anak usia sekolah yang tidak sekolah akan didampingi Pendamping yang melakukan verifikasi, validasi, motivasi, serta pemantauan. Fasilitas diberikan bantuan biaya operasional sekolah (non formal) dan bantuan biaya personal siswa.
15	Menurunkan kematian ibu dan kematian bayi	Upaya yang dilakukan antara lain menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran, mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, OPD lain), hingga Pelatihan Kader Motivator ASI
16	Pembangunan pusat layanan jantung RSUD dr. Soeselo	Pemerintah akan membangun pusat layanan jantung di RSUD dr. Soeselo. Di samping sebagai upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat, pusat layanan jantung didesain sebagai keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif RSUD dr. Soeselo dalam relasi RS di regional dan nasional.
E	Prioritas: Peningkatan produktifitas pemuda dan olah raga berbasis gender	

No	Prioritas Daerah / Inovasi Pembangunan	Gambaran Umum Inovasi
17	Penumbuhan kewirausahaan pemuda	Kabupaten Tegal akan mengalami bonus demografi sejak tahun 2022 dan akan berlangsung hingga tahun 2035. Salah satu upaya yang dilakukan dengan mempersiapkan pemuda sebagai kelompok usia produktif sebagai pelaku aktif pembangunan melalui rekrutmen wirasaha pemuda; pendampingan analisis bisnis, <i>chanelling</i> dan alih teknologi; serta fasilitasi produksi dan pemasaran
18	Musrenbang Komunitas	Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, berbagai komunitas dan gender dilibatkan. Hal ini bertujuan agar hasil pemabngunan yang ada dapat mewarnai berbagai kebutuhan masyarakat yang berbasis gender. Beberapa komunitas yang saat ini selalau dihadirkan dalam proses pengambilan kebijakan antara lain: Komunitas Anak, Pemuda, Lansia, Perempuan, dan Difabel.
F	Prioritas: Pemulihan dan transformasi sektor pertanian, perdagangan, industri, Koperasi dan UKM, pariwisata dan iklim investasi	
19	Optimalisasi fungsi kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK)	LIK Takaru akan ditingkatkan fungsi pelayanannya sebagai weldring centre dan packaging centre. Sebagai weldring centre, LIK akan memfasilitasi keterampilan dan keahlian di bidang pengelasan berteknologi tinggi untuk meningkatkan kualitas produk logam Tegal. Sebagai packaging centre LIK akan memfasilitasi produk Tegal untuk dapat dikemas secara menarik serta tahan lama dalam proses distribusinya.
20	Desa dan Komunitas Inovasi	Pemerintah kabupaten Tegal saat ini mulai merangkul masyarakat desa melalui kelompok-kelompok organisasi masyarakat desa untuk melakukan inovasi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Ada tiga komunitas yang mulai dikembangkan yaitu:
		1) Inovasi masyarakat desa Bumijawa yang dinamakan GUNAU (Golet Urip Neng Alas Urip). GUNAU memanfaatkan lahan hutan rakyat milik Perhutani berdasarkan regulasi perhutanan sosial untuk menciptakan usaha ekonomi masyarakat dengan berkebun (kopi dan jeruk lemon spesifik) sekaligus memanfaatkannya untuk wisata alam dengan tetap menjaga keaslian ekosistem yang ada. Prinsip yang dipegang ialah bahwa hutan harus tetap lestari (Alas tetap Urip). Karena itulah dinamakan GUNAU (Golet Urip Neng Alas Urip);
		2) Komunitas inovasi lainnya yang saat ini sedang dikembangkan ialah kelompok indonesia menanam yang ada di desa Kalikangkung Kec. Pangkah. Konsepnya komunitas ini menginisiasi masyarakat desa untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk bercocok tanam pada komoditas yang potensial. Salah satu komoditas yang dipilih dan dikembangkan saat ini ialah durian. Masyarakat desa diajari dan difasilitasi cara menanam durian yang baik sebagai aset masa depan. Selain dapat menciptakan lapangan kerja mandiri masyarakat desa juga dapat meningkatkan perekonomian keluarga;
		3) Komunitas inovasi budidaya belut alami di desa Kedungwungu Kec. Jatinegara. Konsep budidayanya ialah semi alami. Komunitas ini tetap menjaga kealamiahannya sawah produktif sebagai pembibitan belut. Kemudian mereka menangkap bibit belut alami dari sawah produktif untuk kemudian dibesarkan dalam kolam budidaya yang kemudian dijual dalam berbagai bentuk produk. Untuk menjaga agar sawah produktif tersebut tetap menjadi habitat yang nyaman bagi belut untuk berkembangbiak, maka petani sekaligus kelompok tersebut menghindari pemakaian pestisida yang dapat merusak habitat alami belut;
		4) Komunitas inovasi Rakitan Rakyat Kabupaten Tegal. Komunitas ini melakukan perakitan produk lokal seperti traktor dan komponen logam lainnya dari hasil industri logam setempat terutama di wilayah Kec. Adiwarna

Sumber : Bappedalitbang Kabupaten Tegal, 2022

4.2.14. Pokok-pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tegal

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 direncanakan terdapat 127 Program, Selaras dengan Kebijakan Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagai Penjabaran RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Banyaknya urusan ataupun program kegiatan yang belum masuk dalam dokumen RKPD disesuaikan dengan arah dan kebijakan serta prioritas setiap tahunnya.

Sebagai penyelaras program program kegiatan SKPD yang tengah direncanakan, berikut kami sampaikan juga pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Tegal sebagai jaring aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan Reses, serta hasil audiensi, dan hasil studi banding Tahun 2019 yaitu:

1. Kebijakan Umum dan Program-Program Pembangunan Daerah pada sasaran Terarahnya Pengembangan Wilayah :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Program Pembangunan saluran Drainase / gorong-gorong;
 - c. Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong;
 - d. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
2. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Berdayanya Kelembagaan Desa :

Kebijakan Umum : Menyediakan alokasi anggaran pembangunan desa yang cukup.

 - a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
3. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan pada Sasaran Menguatnya pembangunan Kehidupan Beragama :

Kebijakan Umum :

 - a. Pembangunan Tempat Ibadah;
 - b. Pengalokasian dan pendistribusian anggaran pembangunan umat beragama secara proporsional (bantuan keuangan Madrasah, TPQ, Organisasi keagamaan);
4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Menurunnya kesenjangan pembangunan antar desa dan antar wilayah
 - a. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.
5. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah pada sasaran Meningkatnya derajat hidup masyarakat desa
 - a. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas;
 - b. Program Pengembangan lingkungan sehat;
 - c. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan.

Dengan tidak mengesampingkan program-program unggulan lain, bahwa penyusunan pokok pokok pikiran tersebut didasarkan pada usulan yang merupakan aspirasi prioritas dari masyarakat yang diharapkan dapat terealisasi.